

**PENGARUH KARAKTER EKSEKUTIF DAN GOOD CORPORATE
GOVERNANCE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA
PERUSAHAAN PROPERTY DANREAL ESTATE YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
PADA TAHUN 2012-2014**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

A.NURFAJRIANI P

10800111002

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : A.Nurfajriani P
NIM : 10800111002
Tempat/Tgl.Lahir : Soppeng/28 Mei 1993
Jurusan/Prodi : Akuntansi
Fakultas/Program : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : BTN Mangga Tiga permai Blok D2 No.11. Makassar
Judul :Pengaruh Karakter Eksekutif dan *Good Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2014

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiasi, atau dibuatkan oleh orang lain, sebagian dan seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Makassar, Maret 2016
Penyusun,

A.NURFAJRIANI P
NIM : 10800111002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "**Pengaruh Karakter Eksekutif dan *Good Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2012-2014**" yang disusun oleh **A.Nurfajriani P**, Nim: **10800111002**, mahasiswi jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari selasa, tanggal 01 April 2016 M, bertepatan dengan 20 Jumadil Akhir 1437 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, Jurusan Akuntansi.

Samata - Gowa, 20 Jumadil Akhir 1437 H
01 April 2016 M

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. H. Ambo Asse., M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Prof. Dr. H. Muslimin Kara., M.Ag	(.....)
Munaqisy I	: Dr. H. Abdul Wahab., SE., M.Si	(.....)
Munaqisy II	: Memen Suwandi., SE.M.Si	(.....)
Pembimbing I	: Jamaluddin M., SE. M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Sumarlin., SE. M.Ak	(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
NIP. 19581022 198703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu' alaikumWr. Wb.

Segala puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayat, dan syafaat, kesempatan, kesehatan, kesabaran, dan kekuatan serta ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam juga penulis sampaikan kepada junjungan kita kepada Nabi Muhammad SAW serta sahabat-sahabatnya.

Skripsi dengan judul **“Pengaruh Karakter Eksekutif dan *Good Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2014”**, peneliti hadirkan sebagai salah satu prasyarat untuk menyelesaikan studi S1 dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Selama menyusun skripsi ini, peneliti tidak terlepas dari segala problematika penelitian, namun berkat bimbingan, dorongan, bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu perkenankanlah peneliti menghanturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya terkhusus kepada kedua orang tua tercinta ayahanda H. A. Nur Alam dan ibunda Dra. Hj. Sutriani yang telah mempertaruhkan

seluruh hidupnya untuk kesuksesan anaknya, yang telah melahirkan, membesarkan dan senantiasa mendoakan keberhasilan dan keselamatan selama menempuh pendidikan.

Selain itu, peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
3. Bapak Jamaluddin M.SE., M.Si dan Memen Suwandi SE., M.Si., selaku Ketua Jurusan dan Sekertaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
4. Bapak Jamaluddin M.SE., M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Sumarlin SE., M.Ak selaku pembimbing II yang dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.
5. Bapak dan ibu dosen serta pegawai dalam lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang telah membantu penulis dalam menjalankan masa studi.

6. Bapak pimpinan dan karyawan Bursa Efek Indonesia Perwakilan Makassar yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan membantu selama proses penelitian.
7. Muhammad Rahmat Sukiman yang selalu meluangkan waktunya, memberikan masukan, bantuan dan motivasi kepada penulis.
8. Andi Yanuar Febrianto, Asnidar Akib, Eni Novitasari yang senantiasa memberikan bantuan setiap penulis menemukan kesulitan.
9. Kerabatku Amelia Tirta Yuningsih, Andi Muthmainnah, Adhe Ulfa Achsani, Fakhrunnisa Thamrin, Aisyah Salam, Citra Nur Amalia terima kasih atas waktu, tenaga, motivasi dan dorongan yang senantiasa diberikan kepada penulis.
10. Teman-teman AK 1 dan 2 angkatan 2011 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang selama ini memberi banyak pengalaman, pengetahuan, nasehat, dorongan dan kasih sayang yang tak henti kepada penulis.
11. Teman-teman seperjuanganku QIE-FIGT dimanapun kalian berada yang tanpa hentinya memberikan semangat, dorongan dan motivasi kepada penulis.
12. Teman-teman KKNP Angkatan V, Posko 1 Dusun Bontomanai, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa atas rasa kebersamaan dan kekeluargaan yang terjalin.
13. Serta semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua bantuan yang diberikan bernilai ibadah disisi Allah SWT. Semoga kita mampu menjadi hamba yang bijak, yang mengerti arti diri dan posisi kita diantara hamba-hamba yang lain. Akhirnya hanya kepada Allah jualah penulis serahkan segalanya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang khususnya bagi penulis sendiri.

Wassalamu Alaikum Wr.Wb

Penyusun

A.Nurfajriani P

NIM: 10800111002



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1-18
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Hipotesis.....	11
D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	14
E. Kajian Pustaka.....	17
F. Tujuan dan Kegunaan penelitian.....	19
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	20-41
A. Teori Keagenan	20
B. Pajak.....	23
C. Pajak dalam Perspektif Islam.....	24
D. Penghindaran Pajak.....	26
E. Cash ETR	30
F. Karakter Eksekutif	31
G. Corporate Governance	33
H. Kepemilikan Institusional	37
I. Dewan Komisaris	39
J. Komite Audit.....	39
K. Rerangka Pemikiran	41

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	42-48
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian	42
B. Populasi dan Sampel	42
C. Jenis dan Sumber Data	44
D. Pengukuran Variabel penelitian	44
E. Metode Pengumpulan Data	47
F. Metode Analisis	48
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	53-87
A. Gambaran Umum Objek penelitian	53
B. Karakteristik Objek Penelitian	67
C. Perhitungan Variabel Dependen	68
D. Perhitungan Variabel Independen	69
E. Hasil Analisis dan Pengujian Hipotesis	73
F. Pembahasan	87
BAB V : PENUTUP	91-92
A. Kesimpulan	91
B. Keterbatasan dan Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN.....	99
RIWAYAT HIDUP	107


ALAUDDIN
 M A K A S S A R

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2012-2014	2
Tabel 1.2 Konsep GCG	7
Tabel 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	66
Tabel 4.2 Daftar Perusahaan Sampel	68
Tabel 4.3 Hasil Perhitungan CASH ETR.....	69
Tabel 4.4 Hasil Perhitungan Karakter Eksekutif.....	70
Tabel 4.5 Hasil Perhitungan Kepemilikan Institusional	70
Tabel 4.6 Hasil Perhitungan Struktur Dewan Komisaris	71
Tabel 4.7 Hasil Perhitungan Komite Audit.....	72
Tabel 4.8 Analisis Deskriptif Statistik	73
Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas	76
Tabel 4.10 Hasil Uji Autokorelasi	77
Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolinearitas	78
Tabel 4.12 Hasil Uji F.....	83
Tabel 4.13 Hasil Uji T.....	83
Tabel 4.14 Hasil Uji Koefisien Determinasi	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	42
Gambar 4.1 Uji Normalitas	76
Gambar 4.2 Uji Heterokedastisitas	80



ABSTRAK

Nama : A. Nurfajriani P

NIM : 10800111002

Judul : Pengaruh Karakter Eksekutif dan *Good Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2014

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah karakter eksekutif dan *good corporate governance* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. *good corporate governance* sendiri diproksikan dengan kepemilikan institusional, struktur dewan komisaris, dan komite audit. Adapun perusahaan yang diteliti adalah perusahaan real estate dan property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan real estate dan property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2014. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan program *Statistical Package for Social Sciences* (SPSS) Ver. 17.

Penelitian ini memperoleh hasil bahwa karakter eksekutif dan *good corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan struktur dewan komisaris berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, dan variabel komite audit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: karakter eksekutif, good corporate governance dan penghindaran pajak.

ABSTRAK

Nama : A. Nurfajriani P
NIM : 10800111002
Judul : Pengaruh Karakter Eksekutif dan *Good Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2014

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah karakter eksekutif dan *good corporate governance* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. *good corporate governance* sendiri diproksikan dengan kepemilikan institusional, struktur dewan komisaris, dan komite audit. Adapun perusahaan yang diteliti adalah perusahaan real estate dan property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan real estate dan property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2014. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan program *Statistical Package for Social Sciences* (SPSS) Ver. 17.

Penelitian ini memperoleh hasil bahwa karakter eksekutif dan *good corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan struktur dewan komisaris berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, dan variabel komite audit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: Karakter Eksekutif, Good Corporate Governance dan Penghindaran Pajak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi yang dibebankan kepada wajib pajak atas penghasilan yang diterimanya dan sifatnya memaksa. Pajak secara umum berfungsi sebagai pendapatan dan pengaturan. Pajak sebagai sumber penerimaan Negara digunakan untuk membiayai kepentingan pemerintah dan kepentingan pembangunan, sedangkan pajak sebagai pengaturan dimaksudkan untuk mengatur kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Kemajuan suatu bangsa dapat diukur dari kemampuan bangsa tersebut dalam membiayai dan melaksanakan pembangunannya sendiri. Di Indonesia, pajak adalah sumber pendapatan Negara yang sangat penting selain pendapatan sumber daya alam dan pendapatan non-pajak lainnya.¹ Hal ini merupakan hal yang wajar melihat saat ini pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan penerimaan dari sumber daya alam saja, dimana jumlahnya yang cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun, berbanding terbalik dengan penerimaan dalam sektor pajak yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Begitu besarnya peranan pajak bagi Negara, pemerintah senantiasa berupaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, antara lain dengan program

¹ Calvin Singly, "Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan *Sales Growth* pada *Tax Avoidance*", *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*10, No.1. h.47.

Sensus Pajak Nasional, yang dimulai tahun 2012, dan pengenalan pajak bagi Usaha Mikro, Kecil, dan menengah (UMKM) yang dimulai pada tahun 2013.²

Besarnya penerimaan pajak terhadap jumlah penerimaan Negara ini sesuai dengan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) seperti yang dimuat pada tabel berikut ini³:

Tabel 1.1
Realisasi penerimaan Negara Tahun 2012-2014
(Dalam Miliar Rupiah)

Sumber Penerimaan	2012	2013	2014
Penerimaan Perpajakan	980.518	1.148.365	1.310.219
Penerimaan Bukan Pajak	351.805	349.156	350.930
Total	1.332.323	1.149.521	1.661.149

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Negara dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak perlu mengoptimalkan penerimaan pajaknya guna mempercepat pembangunan nasional. Namun demikian usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor ini bukan tanpa kendala, salah satu kendala dalam rangka mengoptimalkan

² Silvia Ratih Puspita, “Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Terhadap Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012)”, *Skripsi* (Semarang : Fak Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, 2014), h. 1.

³ Badan Pusat Statistik “Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah)”, (Mei 2014), <http://www.bps.go.id/index.php/linkTabelStatis/1286>, (6 Mei 2015).

penerimaan pajak adalah adanya penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), bahkan tidak sedikit perusahaan yang melakukan penghindaran pajak.⁴

Dalam pelaksanaannya pajak merupakan kontribusi yang wajib, namun terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Bagi wajib pajak, pajak dianggap sebagai cambuk terutama untuk perusahaan yang memiliki penghasilan besar, hal ini dikarenakan pemungutan pajak oleh pemerintah akan mengurangi penghasilan yang akan diterimanya. Sedangkan bagi pemerintah pajak digunakan untuk membiayai kepentingan pembangunan, mengatur kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Perbedaan kepentingan ini memungkinkan wajib pajak untuk mengurangi jumlah pembayarannya, baik secara legal maupun illegal, terutama jika ada peluang yang dapat dimanfaatkan.

Menurut Hoque dalam Silvia Ratih Puspita⁵ menemukan alasan-alasan mengapa seseorang tidak melakukan kewajibannya membayar pajak, yaitu: moral pajak yang rendah; kualitas rendah dari balas jasa pajak; sistem pajak dan persepsi dari kejadian yang berbeda; transparansi dan akuntabilitas yang rendah untuk institusi publik; korupsi tingkat tinggi; ada kekosongan peraturan pajak dan peraturan keuangan yang lemah; biaya kepatuhan yang tinggi; lemahnya penegakan atas hukum pajak; tidak tepatnya pemungutan pajak; lemahnya kapasitas dalam

⁴ Judi Budiman dan Setiyono, “Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (tax avoidance)”. *Simposium Nasional Akuntansi 15: Banjarmasin*, (2012): h. 1-2.

⁵ Silvia Ratih Puspita, “Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Terhadap Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012)”, *Skripsi* (Semarang : Fak Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, 2014), h. 1-2.

mendeteksi dan tuntutan dalam pelaksanaan pajak yang tidak tepat; tidak adanya kepercayaan terhadap pemerintah; tarif pajak yang tinggi; dan administrasi pajak yang lemah. Usaha-usaha untuk mengurangi beban pajak inilah yang disebut dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Pada beberapa penelitian serupa menggunakan istilah berbeda mengenai penghindaran pajak ini, di antaranya: agresivitas pajak (*tax aggressiveness*) dan perencanaan pajak (*tax planning*). Namun inti dari istilah-istilah tersebut sama, untuk mengurangi beban pajak.

Scott D Dyreng mengungkapkan bahwa penghindaran pajak mencakup apa pun yang mengurangi pajak perusahaan terhadap laba akuntansi sebelum pajak. Penghindaran pajak sendiri bersifat legal dengan memanfaatkan celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak atau dengan kata lain melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan selain untuk menghindari pajak.⁶ Lain halnya dengan Sankhanath yang mengatakan bahwa penghindaran pajak bersifat illegal, dimana individu atau perusahaan melarikan diri dari pembayaran pajak kepada pemerintah melalui penyembunyian yang disengaja atau keliru atas kewajiban pajak mereka.⁷ Di Indonesia sendiri pada tahun 2013 hampir 4.000 perusahaan multinasional yang tidak membayarkan pajaknya selama tujuh tahun.⁸

⁶ Scott D Dyreng, Michelle Hanlon dan Edward L. Maydew, "The Effect of Executive On Corporate Tax Avoidance", *The Accounting Review* 85, no. 24 (2010): h. 1166

⁷ Sankhanath Bandyopadhyay, "The Problem With Tax : Planning, Avoidance, And Evasion" (2012): h. 3

⁸ Direktorat Jendral pajak, <http://www.pajak.co.id> Diakses Tanggal 10 Oktober 2014.

Penghindaran pajak sering dikaitkan dengan perencanaan pajak, dimana keduanya sama-sama menggunakan cara yang legal untuk mengurangi bahkan menghilangkan kewajiban pajaknya, bedanya perencanaan pajak merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh manajemen untuk mengurangi jumlah pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Menurut Tryas dan Dwi perencanaan pajak merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan.⁹ Akan tetapi, perencanaan pajak tidak diperdebatkan mengenai keabsahannya, sedangkan penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara umum dianggap sebagai tindakan yang tidak dapat diterima.¹⁰ Menurut Hendry perencanaan pajak dan penghindaran pajak merupakan hal umum di beberapa negara berkembang dan sudah sering dijumpai atau telah menjadi perilaku yang dapat diterima.¹¹

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, biasanya tidak lepas dari kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan itu sendiri, melihat bahwa setiap pimpinan perusahaan mempunyai karakter yang berbeda-beda. seorang pimpinan perusahaan memiliki dua karakter yaitu sebagai *risk taker* dan *risk averse*.¹² Pemimpin perusahaan yang bersifat *risk taker* cenderung mengambil risiko yang tinggi, sebaliknya pimpinan perusahaan yang bersifat *risk averse* cenderung

⁹ Tryas Chasbiandani dan Dwi Martani, “Pengaruh *Tax Avoidance* Jangka Panjang Terhadap Nilai Perusahaan”, Simposium Nasional Akuntansi 15: Banjarmasin (2012) h. 7

¹⁰ Ibnu Wijaya, *Mengenal Penghindaran Pajak*, (Artikel Pajak, 2014).

¹¹ Hendry Ordower, “The Culture of Tax Avoidance”, *Legal Studies Research Papaer Series* (2010): h. 1-67.

¹² Judi Budiman dan Setiyono, “Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (*tax avoidance*)”, *Simposium Nasional Akuntansi 15: Banjarmasin* (2012): h. 3.

mengambil risiko yang rendah. Christopher dkk mengungkapkan bahwa penghindaran pajak merupakan salah satu dari banyak peluang investasi yang tersedia bagi pimpinan perusahaan.¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Scott dkk terhadap pengaruh individu *Top Executive* terhadap penghindaran pajak perusahaan, yang mengambil sampel 908 pimpinan perusahaan yang tercatat di *ExecuComp* untuk tahun 2002 sampai tahun 2006 diperoleh hasil bahwa pimpinan perusahaan secara individu memiliki peran yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan.¹⁴

Selain karakter eksekutif, *Good Corporate Governance* (GCG) juga mempengaruhi perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Konsep *Good Corporate Governance* merupakan suatu tuntutan yang harus dihadapi ketika suatu perusahaan telah *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI), oleh karena itu sangat penting bagi manajemen untuk menjalankan perusahaan dengan sebaik mungkin dan bagaimana seharusnya entitas tersebut dapat menempatkan dirinya di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan Negara serta menjadi contoh bagi perusahaan lainnya.¹⁵

Adapun konsep *Good Corporate Governance* pada intinya mengandung pengertian sebagaimana dijelaskan pada tabel 1.2 berikut ini.¹⁶

¹³ Christopher dkk, "Corporate Governance, Incentives, and Tax Avoidance", (2014): h. 11

¹⁴ Scott D Dyreng, Michelle Hanlon dan Edward L. Maydew, "The Effect of Executive On Corporate Tax Avoidance", *The Accounting Review* 85, no. 24 (2010): h. 1168

¹⁵ Hashemi Rodhian Hanum, "Pengaruh Karakteristik *Corporate Governance* terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) Studi Empiris pada BUMN yang terdaftar di BEI selama Periode Tahun 2009-2011", *Skripsi* (Diponegoro: Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 2013), h.24.

¹⁶ Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana, *Etika Bisnis dan profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya – Edisi Revisi* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h.103.

Tabel 1.2
Konsep GCG

1. Wadah	Organisasi (perusahaan, social, pemerintah)
2. Model	Suatu sistem, proses, dan seperangkat pengaturan, termasuk prinsip-prinsip, serta nilai-nilai yang melandasi praktik bisnis yang sehat
3. Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kinerja organisasi • Menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan • Mencegah dan mengurangi manipulasi serta kesalahan yang signifikan dalam pengelolaan organisasi • Meningkatkan upaya agar para pemangku kepentingan tidak dirugikan
4. Mekanisme	Mengatur dan mempertegas kembalikembali hubungan, peran, wewenang, dan tanggung jawab: <ul style="list-style-type: none"> • Dalam arti sempit: antar pemilik/pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi • Dalam arti luas: antar seluruh pemangku kepentingan

Good Corporate Governance sendiri merupakan suatu aturan yang akan menghasilkan suatu kepercayaan pemilik (*principal*) dengan manajemen sehingga nantinya pemilik akan percaya atas seluruh kegiatan perusahaan yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan tersebut. Selain itu, perusahaan dengan tata kelola yang baik lebih mampu membatasi potensi penyelewengan arus kas dari penghindaran pajak dibandingkan perusahaan dengan tata kelola yang buruk.¹⁷ Dalam penelitian ini karakteristik *Good Corporate Governance* yang digunakan adalah kepemilikan instutisional, ukuran dewan komisaris, dan komite audit.

¹⁷ Jeong Bon Kim, Olivier Zhen Li dan Yinghua Li “Corporate Tax Avoidance and Bank Loan Contracting” (2010): h.10.

Salah satu struktur kepemilikan yang cukup besar dalam sebuah perusahaan adalah kepemilikan institusional dimana kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga.¹⁸ Kepemilikan institusional dapat juga disebut dengan investor institusional karena mereka berasal dari luar perusahaan atau dapat dikatakan sebagai manajer eksternal.

Dewan komisaris independen didefinisikan sebagai anggota komisaris yang berasal dari luar perusahaan; tidak memiliki saham baik langsung ataupun tidak langsung dalam perusahaan; tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan perusahaan, komisaris, direksi atau pemegang saham utama perusahaan; dan tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan.¹⁹

Pada umumnya komite audit berfungsi sebagai pengawas dalam proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal, karena BEI (Bursa Efek Indonesia) mengharuskan semua emiten dan perusahaan publik untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen.

Di dalam islam sendiri sebagaimana menurut jumhur ulama yang menyatakan bahwa pajak dapat dipungut dari kaum muslimin, jika memang Negara sangat membutuhkan dana. Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama ini adalah alasan utama untuk mewujudkan kemaslahatan umat karena dana pemerintah

¹⁸ Hashemi Rodhian Hanum, "Pengaruh Karakteristik *Corporate Governance* terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) Studi Empiris pada BUMN yang terdaftar di BEI selama Periode Tahun 2009-2011", *Skripsi* (Diponegoro: Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 2013), h.24.

¹⁹ <http://www.bapepam.go.id/>

tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, yang jika pengeluaran tersebut tidak dibiayai maka akan timbul kemudharatan, sedangkan mencegah kemudharatan adalah suatu kewajiban.²⁰ Dalil yang menjadi dasar para ulama tersebut memperbolehkan pemungutan pajak ada pada Q.S Al Baqarah ayat 177:

لُبِّرَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَا آتَى الْفُلُوقَ وَالْأَخْيَرِ وَالْمَلَائِكَةَ وَالْكِتَابَ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى كَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الزَّ
الْبَاسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Terjemahan:

“bukanlah menghadapkan wajahmu kearah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, dihari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertaqwa.”

Setiap orang mempunyai pandangan yang berbeda terkait dengan penghindaran pajak ini, karena penghindaran pajak sendiri tidak melanggar

²⁰ AriesQ ALq, “Hukum Pajak dalam Perspektif Islam oleh KH. Tb. Ahmad Rifqi Chowas” (02 April 2014), <http://www.buntetpesantren.org/2014/04/hukum-pajak-dalam-perspektif-islam-oleh.html>, (16 April 2015).

peraturan. Dari sisi masyarakat, menganggap bahwa perusahaan tidak ikut berpartisipasi dalam membangun negara serta mensejahterakan masyarakat melalui pembayaran pajak. Tapi di sisi perusahaan sendiri menganggap bahwa penghindaran pajak merupakan lahan keuntungan ekonomi bagi perusahaannya. Di dalam perusahaan terdapat hubungan antara pemegang saham sebagai prinsipal, dan manajer sebagai agen.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin mengkaji tentang **Pengaruh Karakter Eksekutif dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2012-2014.**

B. Rumusan Masalah

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh sebuah perusahaan, biasanya tidak lepas dari peran serta pimpinan perusahaan itu sendiri dalam mengambil kebijakan. Hal ini juga terbukti dari penelitian sebelumnya yang membuktikan bahwa perusahaan (manajemen) memiliki kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah karakter eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

C. Hipotesis

Penghindaran pajak merupakan aktivitas yang secara umum meningkatkan laba setelah pajak perusahaan, sehingga dipandang sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Berdasarkan teori agensi, manajer dan eksekutif lainnya dalam perusahaan sebagai agen diharapkan oleh pemegang saham agar mengurangi beban pajak perusahaan. Scott dkk, meneliti mengenai apakah individu *Top Executive* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak suatu perusahaan. Hasilnya, pimpinan perusahaan (*Executive*) secara individu memiliki peran yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan dari 908 sampel pimpinan perusahaan.²¹ Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Calvin dan I Made²² membuktikan bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif pada *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

H1: Karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan instutisional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan, dan mempengaruhi manajer.²³ Semakin tinggi persentase pemegang saham terbesar menunjukkan bahwa pemegang saham memiliki pengaruh yang lebih

²¹ Scott D Dyreng, Michelle Hanlon dan Edward L. Maydew, "The Effect of Executive On Corporate Tax Avoidance", *The Accounting Review* 85, no. 24 (2010): h. 1167.

²² Calvin Swingly dan I Made Sukartha, "Pengaruh karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan *Sales Growth* pada *Tax Avoidance*" *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 10 no.1 (2015): h.58.

²³ Nuralifmida Ayu Annisa dan Lulus Kurniasih, "Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *tax Avoidance*", *Jurnal Akuntansi dan Auditing* 8, no. 2, Mei (2012): h. 125.

besar untuk menentukan kebijakan perusahaan dan dapat memastikan kebijakan tersebut dapat menguntungkan mereka,²⁴ padahal seharusnya pemegang saham terbesar melalui hak suara yang dimilikinya dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk berperilaku mementingkan dirinya sendiri, karena secara tidak langsung pemegang saham terbesar memiliki kendali yang cukup besar dalam kegiatan perusahaan.

Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi konsentrasi kepemilikan, atau semakin besar kepemilikan oleh pemegang saham terbesar, maka perusahaan akan semakin agresif dalam mengambil keputusan, hal ini akan berdampak pada penghindaran pajak perusahaan yang tinggi.

Berdasarkan uraian diatas hipotesis yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

H2: Konsentrasi kepemilikan instutisional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Peraturan *corporate governance* merupakan alat yang digunakan oleh pemerintah untuk menghindari penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Dewan komisaris dala menjalankan fungsi pengawasannya dapat mempengaruhi pihak manajemen untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas.²⁵ Komisaris

²⁴ Silvia Ratih Puspita, "Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Studi terhadap Perusahaan Non-Kuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012)", *Skripsi* (Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, 2014), h. 54.

²⁵ Kesit Bambang Prakosa, "Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan *Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia", *Symposium Nasional 17: Mataram Lombok*, September (2014): h. 10.

independen merepresentasikan kepentingan pemegang saham minoritas atau pemegang saham publik, yang dimana pemegang saham publik ini cenderung menaati peraturan perpajakan.²⁶ Dengan adanya tanggung jawab tersebut, maka komisaris independen akan memperjuangkan ketaatan pajak perusahaan, sehingga mencegah praktik penghindaran pajak yang bisa dilakukan oleh perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

H3: Ukuran dewan komisaris independen berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak

Komite audit adalah komite tambahan yang bertugas untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas terhadap manajemen perusahaan. Sejak direkomendasikan GCG di Bursa Efek Indonesia tahun 2000, komite audit telah menjadi komponen umum dalam struktur *corporate governance* perusahaan publik.²⁷ Pada umumnya komite audit ini berfungsi sebagai pengawas internal dan pengawas proses pembuatan laporan keuangan. Penelitian yang

²⁶ Silvia Ratih Puspita, "Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Studi terhadap Perusahaan Non-Kuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012)", *Skripsi* (Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, 2014), h. 66.

²⁷ Hotman Tohir Pohan, "Pengaruh Good Corporate Governance, Rasio Tobin Q, Perata Laba terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik", (laporan hasil penelitian 15 September 2010), <http://hotmanpohan.blogspot.com/2010/09/penelitian-hubungan-gcg-dengan-tax.html>, (14 April 2015).

dilakukan oleh Ni Nyoman dan I Ketut Jati²⁸ dan Hashemi²⁹ menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

H4: komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

D. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh karakter eksekutif dan *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak. Dimana variabel karakter eksekutif dan *good corporate governance* digunakan sebagai variabel independen dan penghindaran pajak sebagai variabel dependen. Untuk mengukur *good corporate governance* sendiri digunakan variabel kepemilikan institusional, struktur dewan komisaris dan komite audit.

1. Karakter Eksekutif

Menurut Judi Budiman³⁰ dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan perusahaan eksekutif memiliki dua karakter, yakni sebagai *risk taker* dan *risk averse*, dimana *risk taker* adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis dan biasanya memiliki dorongan kuat untuk

²⁸ Ni Nyoman Kristiana Dewi dan I Ketut Jati, “Pengaruh Karakter Eksekutif, karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola perusahaan yang Baik pada *Tax Avoidance* di Bursa Efek Indonesia”, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 6 no.2 (2014): h.258.

²⁹ Hashemi Rodhian Hanum, “Pengaruh Karakteristik *Corporate Governance* terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) Studi Empiris pada BUMN yang terdaftar di BEI selama Periode Tahun 2009-2011”, *Skripsi* (Diponegoro: Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 2013), h.80.

³⁰ Judi Budiman dan Setiyono, “Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (tax avoidance)”. *Symposium Nasional Akuntansi 15: Banjarmasin*, (2012): h. 3-4

memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi sedangkan *risk averse* adalah eksekutif yang cenderung tidak menyukai resiko sehingga kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis.

2. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga atau institusi. Mayoritas institusi adalah berbentuk perseroan terbatas (PT) domestik maupun perseroan terbatas multinasional, kelemahan dalam kepemilikan yang terkonsentrasi pada institusi adalah kepemilikan dalam jumlah besar dapat mendahulukan kepentingan mereka sendiri yang mungkin sekali bertentangan dengan pemilik lainnya.³¹

3. Dewan Komisaris

Dewan komisaris memiliki peran yang penting dalam tata kelola perusahaan yang baik, dan bahwa tugas utama dewan komisaris adalah mengawasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan tersebut oleh direksi dalam menjalankan perusahaan dan memberi nasihat pada direksi. Tugas komisaris dilakukan melalui komite-komite seperti komite audit, komite remunerasi, komite manajemen resiko dan komite lain. Semakin banyak komite yang ada dalam

³¹ Hashemi Rodhian Hanum, "Pengaruh Karakteristik *Corporate Governance* terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) Studi Empiris pada BUMN yang terdaftar di BEI selama Periode Tahun 2009-2011", *Skripsi* (Diponegoro: Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 2013), h.29.

struktur tata kelola perusahaan, maka semakin banyak anggota komisaris yang dibutuhkan untuk mengisi keanggotaan komite-komite tersebut.³²

4. Komite Audit

Komite audit merupakan salah satu bagian yang paling berperan dalam penerapan *good corporate governance*. Komite audit berfungsi memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian internal perusahaan.³³ Dengan berjalannya fungsi komite audit secara efektif, maka control terhadap perusahaan akan lebih baik sehingga dapat meminimalisir konflik yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri.

5. Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak mencakup apa pun yang mengurangi pajak perusahaan terhadap laba akuntansi sebelum pajak. penghindaran pajak berkenaan dengan pengaturan sesuatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimumkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat yang ditimbulkan, oleh karena itu penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atas undang-undang perpajakan atau secara etik

³² Silvia Ratih Puspita, "Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Studi terhadap Perusahaan Non-Kuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012)", *Skripsi* (Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, 2014), h. 25.

³³ Kesit Bambang Prakosa, Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. (*Simposium Nasional Akuntansi 17* Mataram, Lombok; 2014). h. 10.

tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimkan atau meringankan beban pajak dengan cara-cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak.³⁴

E. Kajian Pustaka

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Calvin Singly dan I Made Sukartha mengenai *Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Sales Growth* pada *Tax Avoidance* menunjukkan bahwa karakter eksekutif dan ukuran perusahaan berpengaruh positif pada *tax avoidance*, sedangkan *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sementara itu variabel komite audit dan *Sales Growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hashemi Rodhian Hanum dengan penelitian tentang *Pengaruh Karakteristik Corporate Governance terhadap Effective Tax Rate (ETR)* menyatakan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *effective tax rate*, ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap *effective tax rate*, dan investor institusional berpengaruh negatif terhadap *effective tax rate*.

Penelitian lain oleh Nuralifmida Ayu Annisa dengan judul *Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance* membuktikan bahwa elemen *corporate governance* yang terdiri dari kualitas audit dan komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap aktivitas *tax avoidance* yang diprosikan dengan *book tax*

³⁴ Nuralifmida Ayu Annisa, *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Terdaftar di BEI Tahun 2004)*. Skripsi Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2011) h. 34.

gap. Sedangkan aktivitas *tax avoidance* tidak dipengaruhi secara signifikan oleh kepemilikan institusional dan dewan komisaris.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari pemaparan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

- a. Mengetahui bahwa karakter eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
- b. Mengetahui bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
- c. Mengetahui bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
- d. Mengetahui bahwa komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2. Kegunaan Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi berbagai aspek, antara lain:

- a. Kontribusi Teoritis

Dalam teori keagenan, penghindaran pajak merupakan jembatan bagi manajerial untuk melakukan manipulasi laba atau penempatan sumber dana yang tidak sesuai, sehingga nantinya, hasil penelitian ini akan lebih

menguatkan pengaruh *agency theory* dalam proses penghindaran pajak. Dimana prinsipal berupaya mengurangi beban pajak dan memaksimalkan keuntungan, sedangkan manajer yang berperan sebagai penggerak perusahaan menjadi pelaku utama penghindaran pajak.

b. Kontribusi Praktisi

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pelaksana administrasi pajak dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak mengenai perusahaan (manajemen) memiliki kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak. Penelitian ini juga dapat menjadi sumber informasi bagi para investor untuk menilai kecenderungan penghindaran pajak dilihat dari segi corporate governance suatu perusahaan.

c. Kontribusi Regulasi

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah di bidang perpajakan untuk membuat peraturan yang dapat mencegah penghindaran pajak oleh perusahaan serta lebih meningkatkan pengawasan bagi setiap perusahaan dalam melaporkan pajaknya, dengan memperhatikan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut mengingat penghindaran pajak ini bersifat legal.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan hal dasar yang digunakan untuk memahami konsep *corporate governance*, teori keagenan ini dikembangkan oleh Michael Johnson seorang professor dari Harvard yang memandang bahwa manajemen perusahaan (*agents*) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang bijaksana serta adil terhadap pemegang saham.¹ Menurut Ross L. Watts dan Jerold L., Zimmerman hubungan kontrak yang terjadi antara manajer dan pemegang saham adalah hubungan *agency*. Hubungan *agency* adalah:²

“a contract under which one or more (principals) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegation some decision making authority to the agent”

Teori keagenan muncul saat terjadi kontrak antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*), karena seorang manajer (*agent*) lebih mengetahui tentang kondisi perusahaan dibandingkan dengan pemilik (*principal*), untuk itu manajer (*agent*) berkewajiban untuk memberikan informasi kepada pemilik (*principal*).

¹ Hashemi Rodhian Hanum, “Pengaruh Karakteristik *Corporate Governance* terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) Studi Empiris pada BUMN yang terdaftar di BEI selama Periode Tahun 2009-2011”, *Skripsi* (Diponegoro: Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 2013), h.31.

² Virginia Monica.. *Persistensi Laba dan perubahan Harga Saham yang Dicerminikan oleh Laba, Aktual, Arus Kas Dimoderasi Book Tax Differences*. (Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4: 1-17). 2013.

Seorang manajer bertugas untuk mengelola perusahaan sebaik mungkin sehingga memperoleh laba yang signifikan. Jumlah laba yang diperoleh tersebut dilaporkan kepada pemilik sehingga pemilik mengetahui seberapa efektif dan efisien kinerja manajer perusahaan. Dengan adanya tanggung jawab yang besar tersebut terkadang membuat manajer menginginkan imbalan yang lebih besar juga. Dengan demikian, perusahaan memiliki dua kepentingan yang berbeda yaitu kepentingan untuk mengoptimalkan keuntungan perusahaan dan kepentingan mengemban tanggung jawab yang besar dan memperoleh imbalan yang besar pula, dengan kata lain kepentingan diri sendiri.

Pemilik (*principal*) mendelegasikan pertanggungjawaban atas *decision making* kepada manajer (*agent*). Dapat dikatakan bahwa wewenang yang diberikan *principal* kepada *agent* untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. Menurut Eisenhardt dalam Hashemi³ bahwa *agency theory* menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalumenghindari risiko (*risk averse*). Berdasarkanasumsi sifat dasar manusia tersebut dikatakan bahwa manajer cenderung bertindak oportunis sesuai keinginan dan kepentingan untuk memaksimalkan *utility*-nya. Hal yang terpenting dalam teori

³ Hashemi Rodhian Hanum, “Pengaruh Karakteristik *Corporate Governance* terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) Studi Empiris pada BUMN yang terdaftar di BEI selama Periode Tahun 2009-2011”, *Skripsi* (Diponegoro: Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 2013), h.32.

agency adalah kewenangan yang diberikan kepada agen untuk melakukan suatu tindakan dalam hal kepentingan pemilik.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pemegang saham sebagai prinsipal yang merupakan pemilik perusahaan berupaya untuk mengurangi beban pajak dan memaksimalkan keuntungan, sedangkan manajer sebagai agen memiliki kepentingan sendiri terhadap sumber daya perusahaan, dimana manajer memiliki wewenang untuk melakukan kegiatan penghindaran pajak, sehingga membuka peluang bagi seorang manajer untuk bersikap oportunis dengan melakukan penghindaran pajak.

Jensen dan Meckling mendefinisikan kontrak antara satu atau beberapa orang *principal* yang mendelegasikan wewenang kepada orang lain (*agent*) untuk mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.⁴ Pelaksanaan kontrak tersebut menimbulkan biaya yang disebut sebagai *agency cost*, yaitu biaya yang timbul agar manajer bertindak selaras dengan tujuan pemilik, seperti pembuatan kontrak ataupun melakukan pengawasan. Penghindaran pajak menggambarkan sebuah kelanjutan dari strategi perencanaan pajak perusahaan, dimana aktivitas penghindaran pajak ini memunculkan kesempatan bagi manajemen dalam melakukan aktivitas yang didesain untuk menutupi berita buruk atau menyesatkan investor.⁵

⁴ Indah Masri dan Dwi Martani. *Pengaruh Tax Avoidance terhadap Cost of Debt*. (Simposium Nasional Akuntansi 15 Banjarmasin: 2012). h. 1-27.

⁵ Tryas Chasbiandani, dan Dwi Martani.. *Pengaruh Tax Avoidance jangka panjang terhadap nilai perusahaan*. (Simposium Nasional Akuntansi 15 Banjarmasin: 2012) h. 1-27.

B. Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat⁶, saat ini ada lima jenis pajak di Indonesia yaitu:

1. Pajak Penghasilan
2. Pajak Pertambahan Nilai
3. Pajak Bumi dan Bangunan
4. Bea Materai
5. Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan

Menurut Mardiasmo (2011) pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.⁷

Definisi pajak menurut UU N0. 36 Tahun 2008 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan

⁶ Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, "Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis", C.V Andi Offset, Yogyakarta (2009): h. 1.

⁷ Felix Daniel Wongso dkk, "Analisis Koreksi Fiskal dalam Rangka Perhitungan PPh Badan PT. Kawanua Dasa Pratama". h. 105.

tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁸

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada negara, dan hanya negara yang berhak untuk memungut pajak, dan iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Tanpa jasa timbal atau kontra prestasi secara langsung. Wajib pajak tidak memperoleh imbalan atau kontra prestasi atas pajak yang telah dibayarkan.
4. Digunakan untuk keperluan negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

C. Pajak dalam Perspektif Islam

Menurut KH.Tubagus Ahmad Rifqi Chowas dalam tulisannya yang berjudul “Hukum Pajak dalam Perspektif Fikih”, secara etimologi pajak dalam islam dikenal dengan istilah *Al-Dharibah* atau biasa disebut *Al-Maks* yang artinya adalah pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak, sedangkan secara istilah menurut

⁸ Silvia Sihombing dan Rika Lidyah, “Analisis Koreksi Fiskal PPh Badan dalam Meminimalisir Pajak Terutang PT. Anugerah Mega Lestari”, h. 2

para ahli keuangan, pajak ialah kewajiban yang ditetapkan kepada wajib pajak, yang harus disetorkan kepada Negara.⁹

Selain itu ada tiga ulama yang memberikan definisi tentang pajak, antara lain¹⁰:

1. Yusuf Qardhawi berpendapat

Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasikan sebagai tujuan ekonomi, social, dan politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh Negara.

2. Gazi Inayah berpendapat

Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan ketentuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.

3. Abdul Qadim Zallum berpendapat

Pajak adalah harta yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada Kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang

⁹ AriesQ ALq, "Hukum Pajak dalam Perspektif Islam oleh KH. Tb. Ahmad Rifqi Chowas" (02 April 2014), <http://www.buntetpesantren.org/2014/04/hukum-pajak-dalam-perspektif-islam-oleh.html>, (16 April 2015)

¹⁰ Gusfahmi, "Pajak Menurut Syariah", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007): h. 31-32.

memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surah At Taubah ayat 41 disebutkan bahwa:

كُنْتُمْ إِنْ لَكُمْ خَيْرٌ ۖ ذَلِكُمْ إِلَهُ سَبِيلٍ فِي أَنْفُسِكُمْ بِأَمْوَالِكُمْ وَجَاهِدُوا وَثِقَالًا خِفَافًا انْفِرُوا تَعْلَمُونَ

Terjemahan:

"berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."

D. Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal, kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik, apabila penghindaran pajak melebihi batas atau melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku maka aktivitas tersebut dapat tergolong ke dalam penggelapan pajak (*tax evasion*).¹¹ Pada dasarnya penelitian mengenai penghindaran pajak didahului dengan mendefinisikan penghindaran pajak itu sendiri. Namun, penghindaran pajak ini juga sering kali dikaitkan dengan penggelapan pajak (*tax evasion*). Apakah penghindaran pajak ini dilarang dalam peraturan atau tidak? Menurut Slemrod dan Yitzhaki bahwa karakteristik yang membedakan antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak

¹¹ Kesit Bambang Prakosa, Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. (*Simposium Nasional Akuntansi 17* Mataram, Lombok; 2014). h. 1-27.

adalah ilegalitasnya, namun masih ada beberapa wilayah yang sulit memisahkannya, selanjutnya dijelaskan bahwa kegiatan penggelapan pajak adalah nyata melawan peraturan yang berlaku, sedangkan penghindaran pajak tidak melanggar peraturan, namun melanggar maksud sebenarnya dari peraturan tersebut.¹² Walaupun secara hukum tidak ada yang dilanggar, semua pihak sepakat bahwa penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara praktik tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak secara langsung berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara.

Menurut komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation Development* (OECD) menyebutkan ada tiga karakter penghindaran pajak yaitu:¹³

1. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak;
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang;
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana pada umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.

¹² Silvia Ratih Puspita, Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Terhadap Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012). *Skripsi* (Semarang : Universitas Diponegoro., 2014).h. 1-125.

¹³ Nuralifmida Ayu Annisa, Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Terdaftar di BEI Tahun 2004). *Skripsi* Surakarta:Universitas Sebelas Maret, 2011) h. 1-85

Penghindaran pajak muncul dalam situasi dimana ajib pajak mengatur urusan keuangannya dengan cara yang akan membuat dia membayar paling sedikit mungkin pajak tanpa melanggar aturan hukum.¹⁴ Dengan kata lain, istilah tersebut digunakan untuk menunjukkan kepada orang lain mengenai berbagai macam cara dengan tujuan untuk menghemat pajak, sehingga dapat melindungi pendapatan pembayar pajak dari kewajiban yang lebih besar. Menurut Wijaya dari sudut pandang kebijakan pajak, pembiaran terhadap praktik penghindaran pajak dapat mengakibatkan ketidakadilan dan berkurangnya efisiensi dari suatu sistem perpajakan. Penghindaran pajak umumnya dilakukan melalui skema-skema transaksi yang kompleks yang dirancang secara sistematis dan umumnya hanya dapat dilakukan oleh korporasi besar.¹⁵ Hal inilah yang menimbulkan persepsi ketidakadilan, dimana korporasi besar tampaknya membayar pajak yang lebih sedikit. Hal ini pada ujungnya dapat menimbulkan keengganan wajib pajak yang lain untuk membayar pajak.

Penghindaran pajak sendiri tidak bebas biaya. Beberapa biaya yang harus ditanggung yaitu biaya pelaksanaan, biaya reputasi dan biaya agensi¹⁶ selain itu pengorbanan waktu dan tenaga untuk melakukan penghindaran pajak tersebut, dan adanya risiko jika penghindaran pajak ini terungkap.

¹⁴ J.F Adebisi, , Ph.D dan Gbegi, D.O.. Effect of Tax Avoidance and Tax Evasion on Personal Income Tax Administration in Nigeria. (*American Journal of Humanities and Social Sciences*: 2013). h.1-10.

¹⁵ Ibnu Wijaya, *Mengenal Penghindaran Pajak*, (Artikel Pajak, 2014).

¹⁶ Katz, Sharon, Urooj Khan dan Andrew P. Schmidt.. Tax Avoidance and Future Profitability: 2013 . h.1-54.

Dalam penelitian Hoque *et al.*, dalam Silvia¹⁷ mengungkapkan beberapa cara perusahaan melakukan penghindaran pajak, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan tersebut;
2. Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional, dan membebankan beban yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi utang pajak perusahaan;
3. Membebankan biaya operasional sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih;
4. Membebankan depresiasi produksi yang berlebihan di bawah nilai penutupan peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak;
5. Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak.

Sedangkan dalam perusahaan multinasional, penghindaran pajak biasanya dilakukan dengan mengalihkan sebagian laba dari perusahaan induk ke anak perusahaan yang beroperasi di negara yang memiliki tarif pajak rendah dibandingkan dengan induk perusahaan.

¹⁷ Silvia Ratih Puspita, “Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Studi terhadap Perusahaan Non-Kuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012)”, *Skripsi* (Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, 2014), h. 13.

E. *Cash ETR (Effective Tax Rate)*

Effective Tax Rate (ETR) pada dasarnya adalah sebuah presentasi besaran pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Hashemi¹⁸ mendefinisikan *effective tax rate* sebagai rasio (dalam presentase) dari pajak yang dibayarkan perusahaan berdasarkan total pendapatan sebelum pajak penghasilan akuntansi sehingga dapat mengetahui seberapa besar presentase perubahan membayar pajak sebenarnya terhadap laba komersial yang diperoleh perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *effective tax rate* adalah perbandingan antara pajak riil yang kita bayar dengan laba komersial sebelum pajak.

Effective tax rate (ETR) dihitung atau dinilai berdasarkan pada informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga *effective tax rate* (ETR) merupakan bentuk perhitungan tarif pajak pada perusahaan.¹⁹ Tarif pajak efektif digunakan untuk mengukur dampak perubahan kebijakan perpajakan atas beban pajak perusahaan tersebut.

Aunulal dalam Hashemi²⁰ memberikan beberapa alasan mendasar terkait dengan penetapan *effective tax rate* (ETR) perusahaan. Alasan pertama adalah

¹⁸ Hashemi Rodhian Hanum, "Pengaruh Karakteristik *Corporate Governance* terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) Studi Empiris pada BUMN yang terdaftar di BEI selama Periode Tahun 2009-2011", *Skripsi* (Diponegoro: Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 2013), h.15

¹⁹ Annisa Fadilla Rachmithasari, "Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance (Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa efek Indonesia 2011-2013), *Naskah Publikasi* (Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta 2015)" h.7

²⁰ Hashemi Rodhian Hanum, "Pengaruh Karakteristik *Corporate Governance* terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) Studi Empiris pada BUMN yang terdaftar di BEI selama Periode Tahun 2009-2011", *Skripsi* (Diponegoro: Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 2013), h.16

adanya pengaruh politik yang terjadi dalam proses perpajakan. Pengaruh perubahan politik terkadang dapat menyebabkan adanya intervensi tergantung dengan bagaimana pihak-pihak yang berkuasa dan yang berkepentingan. Tidak transparasinya proses penetapan tarif pajak yang dilakukan pemerintah menyebabkan adanya kemungkinan intervensi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan. Alasan kedua adalah kandungan informasi laporan pajak perusahaan yang ditimbulkan oleh para *investor*. Dengan laporan pajak maka para *investor* dapat melihat sejauh mana perusahaan mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini dikaitkan dengan *investor* yang cenderung memilih berada pada jalur aman dalam setiap investasinya.

F. Karakter Eksekutif

Seorang manajer dapat mempengaruhi strategi operasional dan keuangan perusahaan, contohnya manajer dapat mengubah penekanan relatif area fungsional yang berbeda dari perusahaan, misalnya pemasaran, operasi, *treasury* dan sumber daya yang dialokasikan untuk menyewa penasihat yang berbeda baik di dalam atau diluar perusahaan.²¹ Pelaku utama penghindaran pajak adalah manajer, karena manajer adalah orang yang menggerakkan perusahaan. Manajer yang menentukan seberapa tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

²¹ Scott D Dyreng, Michelle Hanlon dan Edward L. Maydew, *The Effect of Executive On Corporate Tax Avoidance, The Accounting Review*, (Vol 85, No. 24, 2010) h. 1163-1189.

Menurut Budiman dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan perusahaan eksekutif memiliki dua karakter yaitu sebagai *risk taker* dan *risk averse*.²² Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* cenderung lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis dan biasanya memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi, selain itu eksekutif yang memiliki karakter ini tidak ragu-ragu dalam melakukan pembiayaan dari hutang, hal ini dilakukan agar perusahaan tumbuh lebih cepat. Sedangkan eksekutif yang memiliki karakter *risk averse* cenderung tidak menyukai risiko sehingga kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis, eksekutif dengan karakter ini jika mendapatkan peluang lebih memilih risiko yang rendah. Biasanya eksekutif yang memiliki karakter *risk averse* usianya lebih tua, sudah lama memegang jabatan, dan memiliki ketergantungan dengan perusahaan, berbeda dengan *risk taker* yang lebih menitik beratkan pada keputusan-keputusan yang tidak mengakibatkan risiko yang lebih besar.

Masalah yang kemudian dapat timbul ketika seorang manajer memanfaatkan posisinya tersebut untuk mengalihkan sumber daya perusahaan demi keuntungan pribadinya. Manajer cenderung melakukan penghindaran pajak untuk kepentingan pribadinya disinilah dibutuhkan peran tata kelola perusahaan yang baik guna

²² Judi Budiman dan Setiyono, *Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (tax avoidance)*. (Simposium Nasional Akuntansi 15:Banjarmasin, 2012).

mengontrol agar manajer tidak bertindak sesuai dengan kepentingan pribadinya atau pemegang saham.²³

Tata kelola perusahaan memegang peran penting dan signifikan dalam mempengaruhi perilaku seorang manajer. Dalam perusahaan dengan tata kelola yang buruk, ketika insentif untuk manajer meningkat, tingkat penghindaran pajak perusahaan menurun. Hal ini disebabkan pengalihan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi manajer. Sifat penghindaran pajak yang dilakukan dalam lingkungan yang kompleks dan tidak jelas, membuka kesempatan bagi manajer untuk bertindak oportunistik, mengalihkan sumber daya perusahaan bagi keuntungan pribadinya.²⁴

G. *Good Corporate Governance*

Untuk mengatasi masalah agensi dan mengontrol perilaku manajer, beberapa mekanisme tata kelola perusahaan dapat digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tingkat penghindaran pajak agar sesuai dengan yang diinginkan. Menurut Annisa dengan adanya penerapan *corporate governance* yang baik dalam suatu perusahaan menghasilkan suatu manfaat yang diperoleh, antara lain:²⁵

1. Meningkatkan kinerja perusahaan;

²³ Katz, Sharon, Urooj Khan dan Andrew P. Schmidt.. Tax Avoidance and Future Profitability: 2013 . h.1-54.

²⁴ Silvia Ratih Puspita, Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi terhadap Perusahaan Non-Kuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012). *Skripsi* (Semarang : Universitas Diponegoro: 2014) h.1-125

²⁵ Annisa Ayu Nuralifmida dan Lulus Kurniasih, Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. (*Jurnal Akuntansi dan Auditing*. Vol. 8, No. 2, 2012) h. 123-126.

2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan sehingga meningkatkan nilai perusahaan;
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia;
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan.

Di Indonesia, komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) atau *National Comittee on Governance* menerbitkan *Indonesia's Code of Good Corporate Governance* sebagai pedoman dasar perusahaan dengan menyediakan referensi dalam mengimplementasikan GCG untuk melaksanakan usahanya sehingga menjamin kelangsungan jangka panjang dalam koridor etika bisnis yang pantas meskipun bukan merupakan regulasi, dalam KNKG disebutkan ada tiga pilar yang menyokong implementasi GCG, yaitu :²⁶

1. Regulator, supervisor, dan otoritas penyelenggara peraturan hukum dan regulasi yang akan memajukan penciptaan iklim bisnis yang sehat, efisien, dan transparan, melaksanakan dan memeliharanya, dan membantunya dengan penyelenggaraan hukum yang konsisten;
2. Sektor bisnis sebagai pelaku pasar yang melaksanakan GCG sebagai dasar melaksanakan bisnis;

²⁶ Silvia Ratih Puspita, Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi terhadap Perusahaan Non-Keluangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012). *Skripsi* (Semarang : Universitas Diponegoro: 2014) h.1-125

3. Publik sebagai pemakai produk dan jasa dari sektor bisnis dan sebagai pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan yang menunjukkan perhatian dan melaksanakan tujuan dan control tanggung jawab sosial.

Dalam hubungannya dengan tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri Negara BUMN juga mengeluarkan Keputusan Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan GCG. Ada lima prinsip menurut keputusan ini, yaitu²⁷:

1. **Perlakukuan yang setara (*fairness*)** merupakan prinsip agar para pengelola memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan setara, baik pemangku kepentingan primer (pemasok, pelanggan, karyawan, pemodal) maupun pemangku kepentingan sekunder (pemerintah, masyarakat, dan yang lainnya). Hal inilah yang memunculkan konsep *stakeholders* (seluruh kepentingan pemangku kepentingan), bukan hanya kepentingan *stockholders* (pemegang saham saja).
2. **Prinsip transparansi** (disebut juga prinsip keterbukaan), artinya kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak

²⁷ Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana, *Etika Bisnis dan profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya – Edisi Revisi* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h.106-107.

boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda pengungkapannya.

3. **Prinsip akuntabilitas** adalah prinsip dimana pengelola berkewajiban untuk membina system akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan (*financial statements*) yang dapat dipercaya. Untuk itu, diperlukan kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban setiap organ sehingga pengelolaan berjalan efektif.
4. **Prinsip responsibilitas** (lebih sering disebut *prinsip tanggung jawab*) adalah prinsip dimana para pengelola wajib memberikan pertanggungjawaban atas semua tindakan dalam mengelola perusahaan kepada para pemangku kepentingan sebagai wujud kepercayaan yang diberikan kepadanya. Prinsip tanggungjawab ada sebagai konsekuensi logis dari kepercayaan dan wewenang yang diberikan oleh para pemangku kepentingan kepada para pengelola perusahaan. Tanggung jawab ini mempunyai lima dimensi, yaitu: ekonomi, hokum, moral, social, dan spriritual yang dijelaskan sebagai berikut:
 - a. *Dimensi ekonomi*, artinyatanggung jawab pengelolaan diwujudkan dalam bentuk pemberian keuntungan ekonomis bagi para pemangku kepentingan.
 - b. *Dimensi hukum*, artinya tanggung jawab pengelolaan diwujudkan dalam bentuk ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku; sejauh mana

tindakan manajemen telah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

- c. *Dimensi moral*, artinya sejauh mana wujud tanggung jawab tindakan manajemen tersebut telah dirasakan keadilannya bagi semua pemangku kepentingan.
- d. *Dimesnis sosial*, artinya sejauh mana manajemen telah menjalankan *corporate social responsibility* (CSR) sebagai wujud kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian alam di lingkungan perusahaan.
- e. *Dimensi spiritual*, artinya sejauh mana tindakan manajemen telah mampu mewujudkan aktualisasi diri atau telah dirasakan sebagai bagian dari ibadah sesuai dengan ajaran agama yang diyakininya.

5. **Kemandirian** sebagai tambahan prinsip dalam mengelola BUMN, artinya suatu keadaan dimana para pengelola dalam mengambil suatu keputusan bersifat profesional, mandiri, bebas dari konflik kepentingan, dan bebas dari tekanan/pengaruh dari mana pun yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat.

H. Kepemilikan Instutisional

Kepemilikan institusional merupakan kondisi di mana institusi atau lembaga eksternal yang turut memiliki saham di dalam perusahaan.²⁸ Dengan kata lain,

²⁸ Pujiati, "Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan kesempatan Investasi terhadap Kebijakan Dividen denagn Likuiditas sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empirirs

kepemilikan institusional merupakan saham yang dimiliki oleh institusi atau lembaga (pemerintah, swasta, domestik, asing, dan kepemilikan institusi lainnya).

Dalam hubungan antara strategi pajak dan tata kelola perusahaan, struktur kepemilikan memegang peran yang sangat penting. Penelitian yang dilakukan Shleifer dan Vishney (1986) dalam Annisa menyatakan bahwa pemilik institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Mereka berpendapat bahwa seharusnya pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri. Adanya tanggung jawab perusahaan kepada fidusia, maka pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham.²⁹

Semakin besar kepemilikan institusi maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan dari institusi tersebut untuk mengawasi manajemen. Akibatnya, akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan meningkat, kinerja yang meningkat tersebut akan

pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2013)” *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), h.40.

²⁹ Nuralifmida Ayu Annisa dan Lulus Kurniasih, “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance”, *Jurnal Akuntansi dan Auditing*. Vol. 8, No. 2, 2012) h. 123-126.

menguntungkan bagi pemegang saham karena dengan kata lain pemegang saham akan mendapatkan banyak keuntungan berupa dividen.³⁰

I. Dewan Komisaris

Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI, jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris, disamping hal itu komisaris independen memahami undang-undang dan peraturan tentang pasar modal serta diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham.³¹

J. Komite Audit

Sejak direkomendasikannya GCG di Bursa Efek Indonesia tahun 2000, komite audit telah menjadi komponen umum dalam struktur corporate governance perusahaan publik. Menurut Puspita Otoritas BAPEPAM-LK juga mewajibkan

³⁰ Mayang Patricia, "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Set Kesempatan Investasi, dan Arus Kas Bebas terhadap Kebijakan Utang perusahaan", *Skripsi* (Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, 2014), h.16.

³¹ Hotman Tohir Pohan, *Pengaruh Good Corporate Governance, Rasio Tobin Q, Perata Laba Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Publik*. <http://hotmanpohan.blogspot.com/2010/09/penelitian-hubungan-gcg-dengan-tax.html>. 2010 diakses pada tanggal 3 Januari 2015.

semua perusahaan memiliki komite audit, yang diketuai oleh seorang komisaris independen dan anggota lainnya berasal dari luar perusahaan (independen). Peraturan dari BAPEPAM-LK mengatur mengenai latar belakang komite audit, yaitu sekurang-kurangnya satu diantara komite audit memiliki latar belakang pendidikan atau keahlian di bidang akuntansi atau keuangan, dari minimal jumlah komite audit yaitu 3 orang (Keputusan Ketua BAPEPAM Kep-29/PM/2004). Sedangkan pedoman *Good Corporate Governance* tidak mengatur berapa jumlah komite audit, namun salah satunya harus memiliki latar belakang akuntansi atau keuangan.³²

Adapun tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite audit adalah membantu dewan komisaris, antara lain³³:

1. Mendorong terbentuknya struktur pengendalian intern yang memadai (prinsip tanggung jawab).
2. Meningkatkan kualitas keterbukaan dan laporan keuangan (prinsip transparansi).
3. Mengkaji ruang lingkup dan ketepatan audit eksternal, kewajaran biaya audit eksternal, serta kemandirian dan objektivitas audit eksternal (prinsip akuntabilitas).

³² Silvia Ratih Puspita, Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi terhadap Perusahaan Non-Kuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012). *Skripsi* (Semarang : Universitas Diponegoro: 2014) h.1-125

³³ Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana, *Etika Bisnis dan profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya – Edisi Revisi* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h.111.

4. Mempersiapkan surat uraian tugas dan tanggung jawab komite audit selama tahun buku yang sedang diperiksa eksternal audit (prinsip tanggung jawab).

K. Kerangka Pikir

Sesuai dengan tinjauan teoritis di atas dan dengan melihat penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh karakter eksekutif dan corporate governance terhadap penghindaran pajak, maka penulis menyimpulkan kerangka pikir dalam sebuah bagan berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pikir

Variabel Independen

Karakter Eksekutif (X1)

Corporate Governance

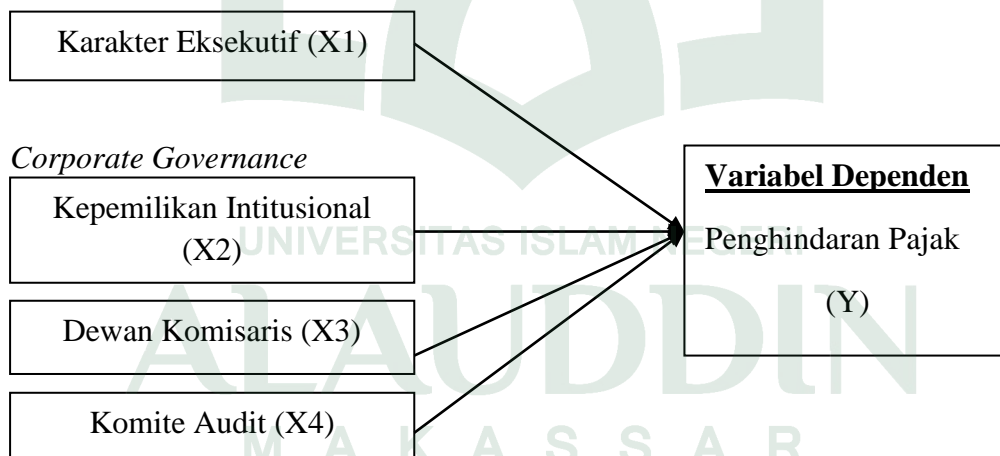
Kepemilikan Intitusional
(X2)

Dewan Komisaris (X3)

Komite Audit (X4)

Variabel Dependen

Penghindaran Pajak
(Y)



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *kuantitatif* yaitu penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik.

Adapun lokasi penelitian yaitu di Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI) Makassar, Ruko Pettarani No. 18 A-4, Jln. A.P. Pettarani Makassar.

B. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹ Disini populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah semua perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012-2014.

Menurut Indriantoro sampel adalah bagian dari elemen-elemen populasi.² Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*, dengan kriteria sebagai berikut:

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung:Alfabeta, 2013). h. 215.

² Nur Indriyantoro dan Supomo Bambang, *Metodologi Penelitian Bisnis*. (BPFE:Yogyakarta, 2014) h. 115.

1. Terdapat laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan selama 3 tahun berturut-turut (2012-2014) yang dapat diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) ataupun dari perusahaan yang bersangkutan.
2. Perusahaan yang diteliti merupakan perusahaan non-keuangan. Pemilihan semua perusahaan non keuangan, karena perusahaan keuangan memiliki karakteristik keuangan yang berbeda dengan perusahaan lainnya, sehingga dapat menimbulkan bias dari hasil penelitian.
3. Tahun buku dalam laporan keuangan tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember. Hal ini dilakukan untuk menyeragamkan sampel.
4. Laporan keuangan tahunan disajikan menggunakan mata uang rupiah, walaupun mata uang ini dapat dikonversi ke dalam rupiah, akan tetapi hal tersebut dapat menimbulkan perbedaan yang diakibatkan oleh kurs yang terus berubah-ubah.
5. Laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan memiliki data yang dibutuhkan 3 tahun proses pengamatan (2012-2014) yaitu mengungkapkan:
 - a. Memiliki dewan komisaris, komisaris independen dan komite audit selama proses pengamatan
 - b. Latar belakang pengalaman atau pendidikan komite audit
 - c. Struktur pemegang saham

Selama tahun 2012 sampai tahun 2014 terdapat 45 perusahaan properti dan real estate. Sebanyak 13 perusahaan tidak memenuhi kriteria sampel, sehingga tidak

dapat digunakan dalam penelitian. Sehingga total sampel dalam penelitian ini adalah 13 perusahaan.

Adapun alasan peneliti mengambil perusahaan property dan real estate sebagai sampel dalam penelitian ini karena pada penelitian sebelumnya belum ada yang meneliti perusahaan tersebut, sehingga peneliti mengangkatnya sebagai sampel.

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Indriyantoro data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).³ Dalam penelitian ini data yang digunakan diperoleh dari Bursa Efek Indonesia pada periode 2012-2014.

D. Pengukuran Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variable independen atau bebas (X) dan variabel dependen atau terikat (Y). ada empat variabel independen atau bebas (X) dalam penelitian ini yaitu, karakter eksekutif, kepemilikan institusional, struktur dewan komisaris dan komite audit. Sedangkan variabel dependen atau terikat (Y) dalam penelitian ini hanya ada satu, yaitu penghindaran pajak. berikut penjelasan dari masing-masing variabel.

³ Nur Indriyantoro dan Supomo Bambang, *Metodologi Penelitian Bisnis*. (BPFE:Yogyakarta, 2014). h. 12

1. Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak dihitung menggunakan CASH ETR (*Effective Tax Rate*) perusahaan, yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak dimana penelitian ini mengikuti Scoot D Dyreng⁴. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung CASH ETR adalah:

$$CASH\ ETR = \frac{Pembayaran\ Pajak}{Laba\ Sebelum\ Pajak}$$

Semakin besar CASH ETR ini mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan.

2. Karakter Eksekutif

Karakter Eksekutif diukur dengan menggunakan risiko perusahaan (*corporate risk*). Untuk mengukur risiko perusahaan, dihitung melalui deviasi standar dari EBITDA (*Earning Before Income Tax, Depreciation, and Amortization*) dibagi dengan total perusahaan, penelitian ini mengikuti penelitian dari Budiman⁵. Adapun rumus deviasi yang dimaksud adalah:

$$RISK = \sqrt{\frac{\sum_{T-1}^T (E - \frac{1}{T} \sum_{T-1}^T E)^2}{T - 1}}$$

Keterangan:

E = EBITDA/Total Aset

⁴ Scott D Dyreng, Michelle Hanlon dan Edward L. Maydew, *The Effect of Executive On Corporate Tax Avoidance*, *The Accounting Review*, (Vol 85, No. 24, 2010) h. 1163-1189.

⁵ Judi Budiman dan Setiyono, "Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (*tax avoidance*)". *Symposium Nasional Akuntansi 15: Banjarmasin*, (2012).

T = Total Sampel

Besar kecilnya risiko perusahaan mencerminkan apakah eksekutif perusahaan termasuk dalam kategori *risk-taking* atau *risk-averse*, semakin besar risiko perusahaan menunjukkan eksekutif perusahaan tersebut adalah *risk-taking*, sebaliknya semakin kecil risiko perusahaan menunjukkan eksekutif perusahaan tersebut adalah *risk-averse*.

3. Kepemilikan Instutisional

Kepemilikan institusional diukur menggunakan persentase kepemilikan institusional terhadap perusahaan secara keseluruhan. Besar kecilnya kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan agresif yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian ini mengikuti Hashemi⁶ dimana apabila suatu perusahaan mempunyai lebih dari satu pemegang saham institusi maka kepemilikan saham diukur dengan menghitung total seluruh saham yang dimiliki oleh seluruh pemilikan institusi, rasio ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{proporsi kepemilikan institusi} = \frac{\sum \text{Saham Institusi}}{\sum \text{Jumlah Saham Beredar}} \times 100\%$$

4. Struktur Dewan Komisaris

Berdasarkan peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 setiap perusahaan yang telah memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota

⁶ Hashemi Rodhian Hanum, "Pengaruh Karakteristik *Corporate Governance* terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) Studi Empiris pada BUMN yang terdaftar di BEI selama Periode Tahun 2009-2011", *Skripsi* (Diponegoro: Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 2013), h.61.

komisaris berarti telah memenuhi pedoman *corporate governance*. Penelitian ini mengikuti Hashemi.⁷ Variabel ini diukur dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{proporsi komisaris independen} = \frac{\sum \text{komisaris independen}}{\sum \text{anggota dewan komisaris}} \times 100\%$$

5. Komite Audit

Pengukuran komite audit ini menyesuaikan dengan peraturan dari otoritas di Indonesia, yaitu BAPEPAM-LK yang mengatur bahwa minimal 1 orang dalam komite audit harus memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan (baik itu pengalaman kerja ataupun pendidikan). Penelitian ini mengikuti Calvin dan I Made⁸ yang dimana variabel ini diukur dengan menghitung jumlah komite audit diluar komisaris independen dibagi dengan jumlah seluruh komite audit perusahaan.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode dokumentasi dan studi pustaka. Dimana metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang sudah ada. Sedangkan studi pustaka dilakukan dengan menggunakan berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian.

⁷ Hashemi Rodhian Hanum, "Pengaruh Karakteristik *Corporate Governance* terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) Studi Empiris pada BUMN yang terdaftar di BEI selama Periode Tahun 2009-2011", *Skripsi* (Diponegoro: Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 2013), h. 60.

⁸ Calvin Singly dan I Made Sukartha, "Pengaruh karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage* dan *Sales Growth* pada *Tax Avoidance*", *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 10 no. 1 (2015): h. 51.

F. Metode Analisis

1. Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Puspita pengujian statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian maksimum, minimum, range, kortosis dan kemencengan distribusi (*skewness*). Deskriptif data yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai *mean*, minimum, maksimum dan standar deviasi dari variabel-variabel penelitian.⁹

2. Uji Asumsi Klasik

Model regresi linier berganda dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi model asumsi normalitas data dan bebas dari asumsi klasik multikolinieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Proses pengujian asumsi klasik dilakukan bersama dengan proses uji regresi berganda sehingga langkah-langkah yang dilakukan dalam pengujian asumsi klasik menggunakan kotak kerja yang sama dengan uji regresi.¹⁰

a. Uji Normalitas

Pengujian normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Suatu variabel dikatakan normal jika gambar distribusi dengan titik-titik

⁹ Silvia Ratih Puspita, Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Terhadap Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012). *Skripsi* (Semarang : Universitas Diponegoro: 1-125, 2014).

¹⁰ Wiranata V Sujarweni, *SPSS Untuk Penelitian* (Yogyakarta:Pustaka Baru Press). h.181.

data menyebar disekitar garis diagonal dan penyebaran titik-titik data searah mengikuti diagonal.¹¹

b. Uji Multikolineiritas

Dengan menggunakan uji VIF, uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan antara independen dalam suatu model. Kemiripan antar variabel independen akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Selain itu uji ini juga untuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Jika VIF yang dihasilkan diantara 1-10 maka tidak terjadi multikolinieritas.¹²

c. Uji Autokorelasi

Autokorelasi digunakan untuk menguji suatu model apakah antara variabel pengganggu masing-masing variabel bebas saling mempengaruhi. Untuk mengetahui apakah pada model regresi mengandung autokorelasi dapat digunakan pendekatan D-W (Durbin Watson).¹³

¹¹ Purbayu Budi Santoso dan Ashari. *Analisis Statistik Dengan Microsoft Exel dan SPSS*. (Yogyakarta: Andi). h.231.

¹² Wiranata V Sujarweni, *SPSS Untuk Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press). h.185.

¹³ Budi Wahyono, *Olah Data Statistik*. (<http://dataolah.blogspot.com/2012/07/v-behaviorurldefaultvmlo.html>.) di akses tanggal 10 januari 2015.

d. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan variansi residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dengan pola gambar scatterplot, regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas jika :¹⁴

1. Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0.
2. Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja.
3. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.
4. Penyebaran titik-titik data tidak berpola.

3. Analisis Regresi Berganda

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan metode analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda yaitu untuk menganalisis pengaruh antara beberapa variabel independen dan dependen.¹⁵ Adapun model penelitiannya sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Penghindaran pajak

¹⁴ Wiranata V Sujarweni, *SPSS Untuk Penelitian* (Yogyakarta:Pustaka Baru Press). h.186-187.

¹⁵ Farhan Quadratullah, *Analisis Regresi Terapan, Teori, Contoh Kasus, dan Aplikasi dengan SPSS*, (Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 2012), h.89

X_1	= Risiko Perusahaan (<i>corporate risk</i>)
X_2	= Kepemilikan Instutisional
X_3	= Ukuran Dewan Komisaris
X_4	= Komite Audit
α	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	= Koefisien Regresi
e	= Error

4. Pengujian Hipotesis

a. Uji Simultasn (F Test)

Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan dengan membandingkan antara nilai F-tabel dengan F-hitung hasil *run* regresi yang dilakukan. Jika $F\text{-tabel} < F\text{-hitung}$ maka dapat disimpulkan model dapat diterima dan layak digunakan untuk menjelaskan ETR. Pengaruh yang signifikan dari variabel independen sebagai faktor yang mempengaruhi nilai ETR harus memiliki nilai signifikansi sebesar $< 0,05$ sehingga dapat dilanjutkan dengan pengujian statistik t.¹⁶

¹⁶ Hashemi Rodhian Hanum, "Pengaruh Karakteristik *Corporate Governance* terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) Studi Empiris pada BUMN yang terdaftar di BEI selama Periode Tahun 2009-2011", *Skripsi* (Diponegoro: Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 2013), h.53.

b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi adalah suatu nilai yang menggambarkan seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Dengan mengetahui nilai koefisien determinasi maka dapat menjelaskan kebaikan dari model regresi dalam memprediksi variabel dependen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi akan semakin baik kemampuan variabel independen dalam menjelaskan perilaku variabel dependen.¹⁷

c. Uji Parsial (T Test)

Uji hipotesis dilakukan dengan uji t. pengujian ini pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Apabila t hitung diperoleh lebih besar dari t tabel berarti t hitung signifikan yang berarti hipotesis diterima. Sebaliknya apabila t hitung yang diperoleh lebih kecil dari t tabel maka berarti hipotesis ditolak. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05% ($\alpha = 5\%$). Penerimaan dan penolakan hipotesis dapat dilihat dari masing-masing variabel. Apabila nilai $t > 0,05$ maka hipotesis ditolak dan sebaliknya jika $t < 0,05$ maka hipotesis diterima.¹⁸

¹⁷ Purbayu Budi Santosa dan Ashari, *Analisis Statistik Dengan Microsoft Excel dan SPSS*, (Yogyakarta: ANDI OFFset, 2005), h.144.

¹⁸ Hashemi Rodhian Hanum, "Pengaruh Karakteristik *Corporate Governance* terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) Studi Empiris pada BUMN yang terdaftar di BEI selama Periode Tahun 2009-2011", *Skripsi* (Diponegoro: Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 2013), h.54.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil PT Agung Podomoro Land Tbk.¹

PT Agung Podomoro Land Tbk. (“APLN” atau “Perseroan”) merupakan perseroan terbatas yang bergerak di bidang properti. Didirikan dengan nama PT Tiara Metropolitan Jaya berdasarkan Akta No. 29 tanggal 30 Juli 2004. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tahun 2010 memutuskan untuk mengganti nama PT Tiara Metropolitan Jaya menjadi PT Agung Podomoro Land Tbk. Pergantian nama tersebut diaktakan dalam Akta No.1 tanggal 2 Agustus 2010, setelah Perseroan melakukan restrukturisasi perusahaan dengan memindahkan empat anak perusahaan Agung Podomoro Grup (APG) yaitu PT Arah Sejahtera Abadi, PT Brilliant Sakti Persada, PT Intersatria Budi Karya Pratama, dan PT Kencana Unggul Sukses, serta dua perusahaan asosiasi APG, yaitu PT Manggala Gelora Perkasa dan PT Citra Gemilang Nusantara ke dalam pengawasan Perseroan dan kemudian melakukan penawaran umum perdana saham, dengan mengeluarkan saham baru dari portepel Perseroan sebanyak 6.150.000.000 saham dari saham yang belum diterbitkan oleh Perseroan dan dengan 14.350.000.000 saham milik pendiri menjadikan total saham yang telah

¹ <http://www.idx.co.id/id-id/beranda/perusahaantercatat/profilperusahaantercatat.aspx>

ditempatkan dan disetor penuh pada saat itu berjumlah 20.500.000.000 dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 11 November 2010.

Pada akhir Desember 2014, APLN telah memiliki 36 (tiga puluh enam) anak usaha, 10 (sepuluh) entitas dengan kepemilikan tidak langsung melalui anak usaha, serta 2 (dua) entitas asosiasi di bidang property di Jakarta, Karawang, Bandung, Bali, Balikpapan, Batam, Makassar, dan Medan.

2. Profil PT Alam Sutera Realty Tbk.

Perusahaan didirikan oleh Harjanto Tirtohadiguno beserta keluarga dengan nama PT Adhihutama Manunggal pada 3 November 1993. Empat belas tahun kemudian, pada 19 September 2007, nama Perusahaan berubah menjadi PT Alam Sutera Realty. PT Alam Sutera Realty Tbk (“Perusahaan”) merupakan Perusahaan pengembang properti terintegrasi. Fokus kegiatan usaha Perusahaan di bidang pembangunan dan pengelolaan perumahan, kawasan komersial, kawasan industri, dan pengelolaan pusat perbelanjaan, pusat rekreasi serta perhotelan (pengembangan kawasan terpadu).

Demi semakin mengokohkan diri sebagai Perusahaan pengembang properti terintegrasi, Perusahaan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode ASRI pada 18 Desember 2007. Sejak itu, Perusahaan resmi menjadi Perusahaan publik dengan nama PT Alam Sutera Realty Tbk.

Seiring dengan upaya pengembangan usaha, Perusahaan senantiasa meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, memanfaatkan teknologi

informasi terkini, dan mengembangkan jaringan usaha yang kuat. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan komitmen dalam menyediakan hunian properti berkualitas, terintegrasi, dan inovatif bagi masyarakat luas.

Bidang usaha Perusahaan berdasarkan Anggaran Dasar adalah pembangunan dan pengelolaan perumahan. Hingga akhir tahun 2014, Perusahaan telah memiliki dan membangun beberapa proyek unggulan, baik dalam bentuk kota mandiri, apartemen, gedung perkantoran, mal, pasar modern, dan taman budaya.

3. Profil PT Bekasi Asri Pemula Tbk.

PT Bekasi Asri Pemula Tbk didirikan pada Oktober 1993 Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah dalam bidang real estate, perdagangan, industri, percetakan, agrobisnis, pertambangan dan jasa angkutan. Perseroan mulai melakukan kegiatan komersial sejak tahun 2004 dan kegiatan usaha yang dijalankan perseroan sampai dengan saat ini adalah real estate.

Produk yang dihasilkan adalah rumah sederhana, rumah menengah keatas dan pasar bersih yang berlokasi di Bekasi dan Pamulang, masih luasnya lahan di kedua daerah tersebut membuat perseroan masih mempunyai potensi yang luas untuk mengembangkan usahanya di masa mendatang. Sebagian besar pembeli rumah perseroan, yang merupakan penduduk dengan tingkat pendapatan

menengah dan bawah, bergantung pada fasilitas KPR untuk mendapat rumah produk perseroan.

4. Profil PT Bumi Citra Permai Tbk.

PT Bumi Citra Permai (BCIP) didirikan pada tanggal 3 Mei 2000 Perusahaan bergerak dalam industri konstruksi dan sector perumahan dengan sebuah kawasan industri dan pergudangan, dengan area seluas 400ha hektar dengan nama "Millennium Industrial Estate" terletak di Km 36 dari pusat Jakarta tepatnya di Cikupa Tigaraksa di Tangerang, Propinsi Banten.

Aktivitas pemasaran dan penjualan gudang dan tanah kavling dimulai pada tahun 2004 dan sampai dengan Desember 2010, Selain menjual kavling-kavling industry siap bangun, Perseroan juga menjual tanah kavling beserta bangunan berupa pabrik/gudang di atasnya, dengan desain dan spesifikasi yang telah ditentukan, Perseroan telah berhasil menjual lahan seluas 18 hektar dengan total untuk tujuh tenant dan gudang sebanyak 10 tenant.

Perseroan memulai debutnya di pasar modal pada tahun 2009 dengan melakukan Penawaran Umum Perdana (IPO) pada 11 Desember 2009, dengan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Jumlah saham yang ditawarkan sebesar 500.000.000 lembar saham dengan harga penawaran sebesar Rp. 110 per saham.

5. Profil PT Cowell Development Tbk.

PT Cowell Development Tbk (Perseroan) didirikan di Jakarta pada 25 Maret 1981, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan kawasan perumahan dan bangunan komersial. Perseroan memulai proyek pertamanya dengan mengembangkan kawasan perumahan Melati Mas Residence (dulu dikenal sebagai Vila Melati Mas) di Serpong pada tahun 1984.

Perubahan kepemilikan diikuti dengan perubahan nama pada tahun 2005. Perseroan yang awalnya bernama PT Internusa Artacipta mengalami perubahan nama menjadi PT Karya Cipta Putra Indonesia. Pada tahun 2007, kembali terjadi perubahan nama dari PT Karya Cipta Putra Indonesia menjadi PT Cowell Development Tbk.

Perseroan telah mengembangkan empat proyek residential utama yang berlokasi di Serpong - Tangerang Selatan, yaitu Melati Mas Residence, Serpong Park, dan Serpong Terrace, Laverde yang merupakan pengembangan dari Serpong Park. Selain itu, Perseroan juga memiliki proyek residensial di Balikpapan, yaitu Borneo Paradiso. Kinerja properti residensial dan komersial milik Perseroan cukup menggembirakan dan membawa Perseroan menjadi salah satu perusahaan properti terbesar di Indonesia.

6. Profil PT Duta Anggada Realty Tbk.

Perusahaan pada awalnya didirikan dengan nama PT Duta Anggada Inti Pratama pada tanggal 30 Desember 1983 berdasarkan Akta Notaris Buniarti

Tjandra, S.H., No. 196 dan kemudian diubah menjadi PT Duta Anggada Realty Tbk. Sejak bulan April 1997. Perusahaan beralamat di Plaza Chase Lt. 21, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920.

Perusahaan memulai aktivitasnya kurang lebih 31 tahun lalu dengan membangun sebuah kompleks hunian di Jakarta Selatan. Dalam rangka mempertahankan reputasinya sebagai Perusahaan terkemuka, Perusahaan kemudian memperluas kegiatan usahanya dari semula hanya di bidang properti untuk investasi, yaitu properti untuk disewakan, hingga juga mencakup bidang properti untuk pengembangan, yaitu properti untuk dijual.

Saat ini, bidang usaha Perusahaan terdiri dari properti untuk disewakan (*investment property*) dan properti untuk dijual (*development property*), properti tersebut terbagi atas beberapa segmen yaitu perkantoran, retail, apartemen, dan hotel. Properti untuk disewakan yang sudah beroperasi yaitu Plaza Chase, Plaza Bapindo, Plaza Great River, Citywalk Sudirman, dan STIE Panjaitan, sedangkan properti untuk disewakan yang masih dalam pembangunan yaitu Holiday Inn & Suites, Hilton Garden Inn dan Icon Towers (office, retail, hotel). Adapun properti untuk dijual yaitu Sinarماس MSIG Tower, La Maison Barito, Plaza Jatinegara, dan Icon Towers (office).

7. Profil PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk.

PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) Tbk memulai sejarahnya pada 14 Mei 1991 dimana Perseroan pertama kali didirikan sebagai

sebuah perusahaan konsorsium antara Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Makassar, Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Gowa, serta pihak swasta. Perseroan pertama kali didirikan dengan nama PT Gowa Makassar Tourism Development Corporation (GMTDC).

Pada tanggal 8 Juli 1991, Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi secara resmi menyetujui GMTDC sebagai Pengelola Kawasan Wisata Tanjung Bunga, Sulawesi Selatan. Sebagai tindak lanjut dari penancangan 10 kawasan wisata yang diumumkan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Pada awalnya tidak ada investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya untuk pengembangan Kawasan Pariwisata Tanjung Bunga, yang saat itu masih penuh dengan semak belukar dan rawa, mengingat besarnya dana yang dibutuhkan, potensi pasar yang tidak pasti serta tingkat risiko yang sangat tinggi.

Proses pengembangan Kawasan Pariwisata Tanjung Bunga memulai langkahnya sejak Lippo Group menyatakan kesediaannya untuk menjadi investor utama dan memutuskan untuk bergabung dengan Perseroan pada tahun 1994. Pada tahun 1995, Perseroan mulai melakukan pengkajian atas pembangunan kawasan, pembelian lahan, pengurusan izin, proses rancang bangun hingga pembuatan master plan kawasan.

Pada tanggal 9 November 2000, Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) melalui surat No. S-3239/PM/2000 untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial*

Public Offering-IPO) dengan menawarkan sebanyak 35.538.000 saham baru Perseroan kepada masyarakat dengan nilai nominal Rp 500 per lembar saham dan harga penawaran Rp 575 per lembar saham. Pencatatan saham Perseroan (*company listing*) dilakukan di Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada tanggal 11 Desember 2000 dan Perseroan secara resmi menjadi Perusahaan Terbuka. Hal ini merupakan catatan penting dalam sejarah perkembangan dunia usaha di Sulawesi Selatan serta Kawasan Timur Indonesia pada umumnya karena Perseroan telah mencatatkan dirinya sebagai perusahaan pertama yang berdomisili di Makassar yang menjadi Perusahaan Terbuka.

8. Profil PT Perdana Gapura Prima Tbk.

PT. Perdana Gapuraprima, Tbk berdiri sejak tanggal 21 Mei 1987 dan mengawali aktifitas operasional komersial di tahun 1994. Berawal dari lingkup usaha bidang pemborongan bangunan (kontraktor) dengan merencanakan, mengerjakan dan mengawasi pekerjaan pembangunan rumah , gedung serta jual - beli bangunan termasuk hak atas tanahnya.

Kantor pusat Gapuraprima berlokasi di The Bellezza, Permata Hijau, Jl. Arteri Permata Hijau No. 34 Jakarta 12210. Perseroan telah memantapkan kiprah di bidang properti dengan memiliki beragam real estate seperti perumahan Bukit Cimanggu Villa dan Taman Raya Citayam di Bogor, perumahan Metro Cilegon, Taman Raya Cilegon dan Anyer Palazzao di Cilegon serta apartemen Kebagusan

City di selatan Jakarta, Bellevue Place di MT Haryono Jakarta, Grand Park di Pakuan Bogor dan West Town Cengkareng.

Tanggal 2 Oktober 2007, Perdana Gapuraprima menerima pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham Perusahaan kepada masyarakat sebanyak 962.000.000 lembar dengan nilai nominal Rp. 100 per lembar saham dan ditawarkan dengan harga Rp. 310 per lembar saham yang disertai dengan penerbitan 192.400.000 Waran Seri I. Saham Waran Seri I tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 10 Oktober 2007.

Saat ini perseroan menjadi grup pengembang yang disegani dengan membangun proyek apartemen, perkantoran, pusat perbelanjaan, perumahan, hotel yang tersebar tidak saja di wilayah Jabodetabek namun di kawasan potensial lain seperti Bandung, Solo dan Bali.

9. Profil PT Jaya Real Property Tbk.

Perusahaan didirikan pada tahun 1979 dengan nama PT. Bintaro Raya berdasarkan Undang – Undang Penanaman Modal Dalam Negeri pada Tanggal 25 Mei 1979. Nama perusahaan kemudian diubah menjadi PT. Jaya berdasarkan Akta No. 133 pada Tanggal 14 Mei 1992 dibuat di hadapan Sutjipto, notaris di Jakarta.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial sejak Tahun 1980 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (dahulu PT. Bursa Efek Jakarta) sejak Tahun

1994. Ruang lingkup kegiatan perusahaan adalah pengembangan kota (*urban development*) yang meliputi pengembangan kawasan perumahan dan industri, pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum, penyediaan jasa-jasa pendukung, serta melakukan investasi, baik langsung dan tidak langsung melalui entitas anak maupun patungan dengan pihak-pihak lain.

Saat ini kegiatan utama perusahaan adalah pembangunan perumahan di daerah Jakarta Selatan dan Tangerang serta pengelolaan usaha properti. Kegiatan usaha tersebut meliputi pembebasan tanah, pengembangan real estate dan persewaan pusat perbelanjaan.

10. Profil PT Lamicitra Nusantara Tbk.

Pendirian PT. Lamicitra Nusantara pada 29 Januari 1988 di Surabaya. Perseroan semula bergerak pada bidang kontraktor umum pembangunan jalan dan jembatan, kemudian perseroan mengembangkan usahanya dibidang property dengan membangun Pusat Grosir Jembatan Merah Plasa Surabaya (1990) yang diikuti pembangunan Hotel Tunjungan Surabaya pada tahun 1992, serta pembangunan Kawasan Industri Berikat di area Pelabuhan Semarang Jawa Tengah pada tahun 1992 yang dikenal sebagai Kawasan Industri Tanjung Emas Eksport Prosesing Zone.

PT Lamicitra Nusantara pada perjalanan usahanya berkembang dengan pesat dan untuk dapat mengelola dengan baik hubungan anak usahanya, maka dibentuklah Holding company

Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana PT Lamicitra Nusantara Tbk, dengan penawaran Umum atas 80.000 saham Perseroan disertai waran seri 1 sebesar 160.000 saham dengan dual listing di Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Jakarta. 18 Juli 2001 Saham Perseroan mulai diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, dengan underwriter PT Trimega Securitas dan konsultan hukum Taira, Faisal Panggabean dan rekan.

11. Profil PT Lippo Cikarang Tbk.

Cikal bakal Lippo Cikarang, PT Desa Dekalib didirikan pada tahun 1987 di Jakarta. Bidang usaha Perseroan meliputi perdagangan, industry, percetakan, pertambangan, perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan, pengangkutan, pergudangan, perhutanan dan pemasokan aneka barang. Kemudian pada tahun 1988 PT Desa Dekalb diubah menjadi PT Gunungcermai Inti, setelah itu pada tahun 1992 PT Gunungcermai Inti diubah lagi menjadi PT Lippo City Development, dan kedudukan dipindahkan dari Jakarta ke Bekasi, Jawa Barat. Kemudian pada tahun 1995 PT Lippo City Development ditransformasi menjadi PT Lippo Cikarang. Pada tahun 1997 status Lippo Cikarang diubah dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka, dengan bidang usaha real estate dan pengembangan perkotaan.

Lippo Cikarang memulai pengembangan bisnis propertinya dengan sebuah visi yaitu membangun kawasan Kota Industri yang lengkap dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk bekerja, tinggal dan gaya hidup .

Pada tanggal 24 Juli 1997, 696.000.000 saham Lippo Cikarang dicatatkan dan mulai diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya (kedua bursa telah demerger menjadi Bursa Efek Indonesia). Perseroan berhasil membangun kawasan ramah lingkungan, yang secara cepat tumbuh menjadi Kota Mandiri dengan kawasan industri sebagai basis ekonomi di lahan seluas 3.000 hektar yang terletak sekitar 30 kilometer dari Jakarta, di Koridor Timur Jakarta.

Saat ini, kawasan residensial dihuni oleh hamper 46.200 penduduk, dengan kawasan komersial yang mampu menarik pengunjung dari seluruh wilayah; serta kawasan industri dari 820 pabrik bebas polusi, dan jumlah pekerja lebih dari 400.000 orang, dengan fasilitas lengkap pusat perbelanjaan dan rekreasi, sarana olah raga, sarana pendidikan dan kesehatan.

12. Profil PT Pudjiadi Prestige Tbk.

Perusahaan Induk dari PT. Pudjiadi Prestige Tbk (“Perseroan”) yaitu The Jayakarta Group memulai bisnisnya dari sebuah perusahaan import/export kecil yang didirikan oleh Bapak Sjukur Pudjiadi pada tahun 1952.

Manajemen properti dan kontraktor menjadi akar bisnis Perseroan ketika didirikan sebagai anak perusahaan dari The Jayakarta Group pada tanggal 11 September 1980 Perseroan memulai keterlibatannya dalam pengembangan properti di Indonesia melalui pembangunan Pusat Perbelanjaan Jayakarta Plaza dan Apartemen Jayakarta yang berlokasi di Jakarta Barat pada tahun 1981 dan menjadi pionir dalam pembangunan apartemen di Jakarta.

Saat ini Perseroan telah memiliki rekam jejak dalam bidang pembangunan, penjualan maupun pengelolaan properti di kancah bisnis properti Indonesia dengan membangun apartemen, perumahan, hotel, pusat perbelanjaan yang tersebar di beberapa kota di Indonesia seperti Jakarta, Anyer, Serang, Bandung, Yogyakarta, Bali hingga Flores.

13. Profil PT Pakowon Jati Tbk.

PT. Pakuwon Jati Tbk. didirikan berdasarkan akta No. 281 tanggal 20 September 1982 Pakuwon Jati saat ini memiliki dan mengelola pusat perbelanjaan terbesar di Indonesia, dengan 7 pusat perbelanjaan lebih dari 510.000m2 leasable area yang berada di Jakarta dan Surabaya yang didukung dengan penyewa utama yang solid. Perusahaan berdomisili di Surabaya dengan kantor pusat berlokasi di Eastcoast Center Lt. 5, Pakuwon Town Square – Pakuwon City, Jl. Kejawan Putih Mutiara No. 17, Surabaya, Indonesia.

Pada tanggal 22 Agustus 1989, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam (sekarang Otoritas Jasa Keuangan/OJK) sesuai dengan suratnya No. SI-044/SHM/MK.10/1989, untuk melakukan penawaran umum atas 3.000.000 saham Perusahaan kepada masyarakat. Pada tanggal 9 Oktober 1989, saham-saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia).

Pada tanggal 29 Juni 1994, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam sesuai dengan suratnya No. S-1163/PM/1994, untuk

melakukan Penawaran Umum Terbatas II Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebesar 105.000.000 saham kepada pemegang saham. Pada tanggal 29 Juni 1994 dan 15 Juli 1994, saham-saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia).

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa gambaran umum objek penelitian, sebagaia berikut:

Tabel 4.1
Gambaran Umum Objek Penelitian

No	Nama Perusahaan	Tanggal Berdiri	Alamat
1	PT Agung Podomoro Land Tbk.	30 Juli 2004	APL Tower 43rd-46th Floor, Podomoro City Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28 Jakarta 11470, Indonesia
2	PT Alam Sutera Realty Tbk.	3 November 1993	Wisma Argo Manunggal 18th Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 22 Jakarta 12930 Indonesia
3	PT Bekasi Asri Pemula Tbk.	Oktober 1993	Gd. Tomang Tol Lantai 2 Jl. Arjuna No, 1 Tanjung Duren Selatan Jakarta 11 470
4	PT Bumi Citra Permai Tbk.	3 Mei 2000	Jalan Kramat Raya No. 32 - 34, Jakarta
5	PT Cowell Development Tbk.	25 Maret 1981	Cowell Tower 3nd floor Jl. Senen Raya No. 135, Jakarta 10410
6	PT Duta Anggada Realty Tbk.	30 Desember 1983	Plaza Chase, Lantai 21 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21 Jakarta 12920
7	PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk.	14 Mei 1991	Jl, Metro Tanjung Bunga Mall GTC, GA-9 No, 1B Tanjung Bunga Makassar

			90134, Sulawesi Selatan Indonesia
8	PT Perdana Gapura Prima Tbk.	2 Mei 1987	The Bellezza, Permata Hijau, Jl. Arteri Permata Hijau No. 34 Jakarta 12210
9	PT Jaya Real Property Tbk.	25 Mei 1979	PT Jaya Real Property, Tbk. CBD Emerald Blok CE/A no. 1 Boulevard Bintaro Jaya, Tangerang 15227, Indonesia
10	PT Lamicitra Nusantara Tbk.	29 Januari 1988	Jembatan Merah Plaza Lt.5, Jl. Taman Jayengrono No. 2-14, Surabaya 60175-Indonesia
11	PT Lippo Cikarang Tbk.	1987	Easton Commercial Centre Jl. Gunung Panderman Kav. 05 Lippo Cikarang Bekasi 17550, Indonesia
12	PT Pudjiaji Prestige Tbk.	1952	Hotel Jayakarta 21st Floor Jalan Hayam Wuruk No. 126, Jakarta 11180
13	PT Pakuwon Jati Tbk.	20 september 1982	EastCoast Center 5th Floor Jl Kejawan Putih Mutiara No. 17 Pakuwon City, Surabaya 60112

Sumber: Bursa Efek Indonesia, 2015

B. Karakteristik Objek Penelitian

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) Perwakilan Kota Makassar, diketahui bahwa jumlah Perusahaan Property dan Real

Estate yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah sebanyak 45 perusahaan. Berdasarkan kriteria dan teknik pemilihan sampel yang telah ditentukan, hanya terdapat 13 dari 45 perusahaan property dan real estate yang *listing* di BEI yang memenuhi syarat dari metode *purposive sampling* yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 4.2
Daftar Perusahaan Sampel

No	Kode	Nama Perusahaan
1	APLN	PT Agung Podomoro Land Tbk.
2	ASRI	PT Alam Sutera Realty Tbk.
3	BAPA	PT Bekasi Asri Pemula Tbk.
4	BCIP	PT Bumi Citra Permai Tbk.
5	COWL	PT Cowell Development Tbk.
6	DART	PT Duta Anggada Realty Tbk.
7	GMTD	PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk.
8	GPRA	PT Perdana Gapura Prima Tbk.
9	JRPT	PT Jaya Real Property Tbk.
10	LAMII	PT Lamicitra Nusantara Tbk.
11	LPCK	PT Lippo Cikarang Tbk.
12	PUDP	PT Pudjiati Prestige Tbk.
13	PWON	PT Pakuwon Jati Tbk.

Sumber: Bursa Efek Indonesia, 2015

C. Perhitungan Variabel Dependen

Variable dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Dimana penghindaran pajak ini diukur dengan cara menghitung CASH ETR perusahaan, yang mana CAH ETR ini diperoleh dari pembayaran pajak tahun berjalan dibagi dengan laba sebelum pajak tahun berjalan.

Tabel 4.3
Hasil Perhitungan CASH ETR

Kode	Nama Perusahaan	Cash ETR		
		2011	2012	2013
APLN	PT Agung Podomoro Land Tbk.	0.23	0.21	0.20
ASRI	PT Alam Sutera Realty Tbk.	0.10	0.18	0.15
BAPA	PT Bekasi Asri Pemula Tbk.	0.18	0.26	0.25
BCIP	PT Bumi Citra Permai Tbk.	0.37	0.11	0.27
COWL	PT Cowell Development Tbk.	0.18	0.36	0.20
DART	PT Duta Anggada Realty Tbk.	0.25	0.25	0.18
GMTD	PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk.	0.16	0.14	0.12
GPRA	PT Perdana Gapura Prima Tbk.	0.20	0.18	0.29
JRPT	PT Jaya Real Property Tbk.	0.13	0.14	0.13
LAMII	PT Lamicitra Nusantara Tbk.	0.16	0.13	0.19
LPCK	PT Lippo Cikarang Tbk.	0.11	0.11	0.10
PUDP	PT Pudjiaji Prestige Tbk.	0.13	0.10	0.10
PWON	PT Pakuwon Jati Tbk.	0.15	0.15	0.09

Sumber: Data Sekunder diolah 2016

Hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa hasil CASH ETR terendah sebesar 0.10 dan hasil tertinggi sebesar 0.37. sehingga, semakin besar CASH ETR yang didapat, artinya semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

D. Perhitungan Variabel Independen

Variable independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah karakter eksekutif (X_1) dan *good corporate governance*. *Good corporate governance* dalam penelitian ini diukur dengan melihat kepemilikan instutisional (X_2), struktur dewan komisaris (X_3) dan komite audit (X_4). Adapun hasil dari perhitungan komponen – komponen *good corporate governance*, sebagai berikut:

Table 4.4
Hasil Perhitungan Karakter Eksekutif (X₁)

Kode	Nama Perusahaan	Karakter Eksekutif		
		2011	2012	2013
APLN	PT Agung Podomoro Land Tbk.	16.06	16.19	16.28
ASRI	PT Alam Sutera Realty Tbk.	15.90	16.03	16.11
BAPA	PT Bekasi Asri Pemula Tbk.	17.23	17.29	17.28
BCIP	PT Bumi Citra Permai Tbk.	17.62	17.73	17.89
COWL	PT Cowell Development Tbk.	18.44	18.49	18.80
DART	PT Duta Anggada Realty Tbk.	15.43	15.48	15.52
GMTD	PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk.	18.10	18.29	18.36
GPRA	PT Perdana Gapura Prima Tbk.	18.29	18.30	18.36
JRPT	PT Jaya Real Property Tbk.	15.50	15.61	15.65
LAMII	PT Lamicitra Nusantara Tbk.	14.46	14.45	14.46
LPCK	PT Lippo Cikarang Tbk.	18.32	18.83	18.88
PUDP	PT Pudjiati Prestige Tbk.	17.64	17.65	17.70
PWON	PT Pakuwon Jati Tbk.	15.71	15.81	16.11

Sumber: Data Sekunder diolah 2016

Hasil perhitungan di atas. Diketahui bahwa hasil terendah pada tahun 2012 sebesar 14.45 dan hasil tertinggi pada tahun 2014 sebesar 18.88. sehingga, semakin besar risiko perusahaan menunjukkan eksekutif perusahaan tersebut adalah *risk taking*, sebaliknya semakin kecil risiko perusahaan menunjukkan eksekutif perusahaan tersebut adalah *risk averse*.

Tabel 4.5
Hasil Perhitungan Kepemilikan Institusional (X₂)

Kode	Nama Perusahaan	Kepemilikan Institusional		
		2011	2012	2013
APLN	PT Agung Podomoro Land Tbk.	0.67	0.67	0.67
ASRI	PT Alam Sutera Realty Tbk.	0.47	0.52	0.51
BAPA	PT Bekasi Asri Pemula Tbk.	0.70	0.64	0.77
BCIP	PT Bumi Citra Permai Tbk.	0.52	0.52	0.95
COWL	PT Cowell Development Tbk.	0.95	0.85	0.85
DART	PT Duta Anggada Realty Tbk.	0.90	0.90	0.90
GMTD	PT Gowa Makassar Tourism	0.65	0.65	0.65

	Development Tbk.			
GPRA	PT Perdana Gapura Prima Tbk.	0.83	0.85	0.84
JRPT	PT Jaya Real Property Tbk.	0.76	0.76	0.76
LAMII	PT Lamicitra Nusantara Tbk.	0.93	0.93	0.93
LPCCK	PT Lippo Cikarang Tbk.	0.42	0.42	0.42
PUDP	PT Pudjiaji Prestige Tbk.	0.45	0.45	0.45
PWON	PT Pakuwon Jati Tbk.	0.70	0.52	0.58

Sumber: Data Sekunder diolah 2016

Data di atas, kita dapat melihat bahwa jumlah nilai yang tertinggi dari keseluruhan data adalah 0.95%, sedangkan nilai yang terendah adalah 0.42%. hal ini menunjukkan bahwa, secara keseluruhan perusahaan yang menjadi sampel telah memiliki institusional yang tinggi. Sehingga, kita dapat menyimpulkan bahwa semakin tinggi nilai kepemilikan institusional dalam perusahaan, maka tingkat pengawasan terhadap kegiatan operasional yang dilakukan oleh pihak institusi juga semakin tinggi.

Tabel 4.6
Hasil Perhitungan Struktur Dewan Komisaris (X₃)

Kode	Nama perusahaan	Struktur Dewan Komisaris		
		2011	2012	2013
APLN	PT Agung Podomoro Land Tbk.	0.33	0.33	0.33
ASRI	PT Alam Sutera Realty Tbk.	0.40	0.40	0.40
BAPA	PT Bekasi Asri Pemula Tbk.	0.33	0.33	0.33
BCIP	PT Bumi Citra Permai Tbk.	0.33	0.33	0.33
COWL	PT Cowell Development Tbk.	0.33	0.33	0.33
DART	PT Duta Anggada Realty Tbk.	0.33	0.33	0.33
GMTD	PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk.	0.20	0.33	0.38
GPRA	PT Perdana Gapura Prima Tbk.	0.33	0.33	0.33
JRPT	PT Jaya Real Property Tbk.	0.40	0.40	0.40
LAMII	PT Lamicitra Nusantara Tbk.	0.33	0.33	0.33
LPCCK	PT Lippo Cikarang Tbk.	0.50	0.57	0.33
PUDP	PT Pudjiaji Prestige Tbk.	0.67	0.67	0.33

PWON	PT Pakuwon Jati Tbk.	0.67	0.67	0.67
------	----------------------	------	------	------

Sumber: Data Sekunder diolah 2016

Data diatas, kita dapat melihat bahwa nilai bahwa nilai yang tertinggi adalah 0.67% dan nilai terendah adalah 0.20%. yang menunjukkan bahwa keseluruhan perusahaan yang menjadi sampel penelitian telah memiliki jumlah dewan komisaris yang lebih dari 3 orang. Sehingga, semakin banyak anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan, maka pengawasan dalam perusahaan semakin rendah dikarenakan banyaknya orang dalam suatu dewan komisaris, maka semakin sulitnya dewan komisaris untuk berdiskusi.

Tabel 4.7
Hasil Perhitungan Komite Audit (X₄)

Kode	Nama Perusahaan	Komite Audit		
		2011	2012	2013
APLN	PT Agung Podomoro Land Tbk.	0.88	0.89	0.89
ASRI	PT Alam Sutera Realty Tbk.	0.86	0.80	0.80
BAPA	PT Bekasi Asri Pemula Tbk.	0.67	0.67	0.67
BCIP	PT Bumi Citra Permai Tbk.	0.67	0.67	0.67
COWL	PT Cowell Development Tbk.	0.67	0.67	0.67
DART	PT Duta Anggada Realty Tbk.	0.80	0.80	0.80
GMTD	PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk.	0.67	0.67	0.67
GPRA	PT Perdana Gapura Prima Tbk.	0.50	0.50	0.67
JRPT	PT Jaya Real Property Tbk.	0.67	0.67	0.67
LAMII	PT Lamicitra Nusantara Tbk.	0.67	0.67	0.67
LPCK	PT Lippo Cikarang Tbk.	0.67	0.67	0.67
PUDP	PT Pudjiaji Prestige Tbk.	0.67	0.67	0.67
PWON	PT Pakuwon Jati Tbk.	0.67	0.67	0.67

Sumber: Data Sekunder diolah 2016

Data diatas, kita dapat melihat bahwa keseluruhan sampel yang diteliti memiliki jumlah komite audit yang telah sesuai dengan ketentuan perusahaan yang

membuktikan bahwa perusahaan telah menerapkan prinsip *good corporate governance* dalam perusahaannya.

E. Hasil Analisis dan Pengujian Hipotesis

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah pengolahan data yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi.² Yang mana gambaran terhadap obyek penelitian ini dilihat dari nilai minimum, maksimum, mean (rata-rata), dan standar deviasi dari variable yang diteliti. Adapun hasil analisis deskriptif dari penelitian ini, sebagai berikut:

Tabel 4.8
Analisis Deskriptif Statistik

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
KE	39	14.45	18.88	660.26	16.9298	1.36131
KI	39	.42	.95	26.90	.6896	.17626
DK	39	.20	.67	15.38	.3943	.11931
KA	39	.50	.89	27.17	.6968	.08697
Cash ETR	39	.09	.37	6.96	.1783	.07002
Valid N (listwise)	39					

Sumber: Data Sekunder diolah 2016

Hasil analisis deskriptif diatas, kita dapat melihat bahwa jumlah data yang diobeservasi dalam penelitian (N) ini adalah 39. Penghindaran pajak yang

² V. Wiratna Surjaweni, *SPSS Untuk Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hal. 29.

dimiliki oleh perusahaan mempunyai nilai minimum 0.09, maksimum 0.37, mean 0.1783 dan standar deviasi 0.07002.

Variabel karakter eksekutif nilai minimumnya adalah 14.45, nilai maksimumnya adalah 18.88, nilai mean adalah 16.9298, dan nilai standar deviasi adalah 1.36131. Artinya, ukuran karakter eksekutif yang dimiliki oleh perusahaan paling kecil adalah 14.45%, paling besar adalah 18.88%, rata-rata ukuran karakter eksekutif yang dimiliki oleh perusahaan adalah 16.9298%, dan standar deviasi yang menunjukkan variasi yang terdapat dalam ukuran karakter eksekutif adalah 1.36131%.

Kepemilikan institusional memiliki nilai minimum adalah 0.42, nilai maksimum adalah 0.95, nilai mean adalah 0.6896, dan nilai standar deviasi adalah 0.17626. Artinya, kepemilikan institusional paling kecil yang dimiliki oleh perusahaan adalah 0.42%, paling besar adalah 0.95%, rata-rata kepemilikan institusional yang dimiliki oleh perusahaan adalah 0.6896%, dan standar deviasi yang menunjukkan variasi yang terdapat dalam kepemilikan institusional adalah 0.17626%.

Variabel struktur dewan komisaris nilai minimumnya adalah 0.20, nilai maksimumnya adalah 0.67, nilai mean adalah 0.3943, dan nilai standar deviasi adalah 0.11931. Artinya, struktur dewan komisaris yang dimiliki oleh perusahaan paling kecil adalah 0.20%, paling besar adalah 0.67%, rata-rata struktur dewan komisaris yang dimiliki oleh perusahaan adalah 0.3943%, dan standar deviasi

yang menunjukkan variasi yang terdapat dalam ukuran karakter eksekutif adalah 0.11931%.

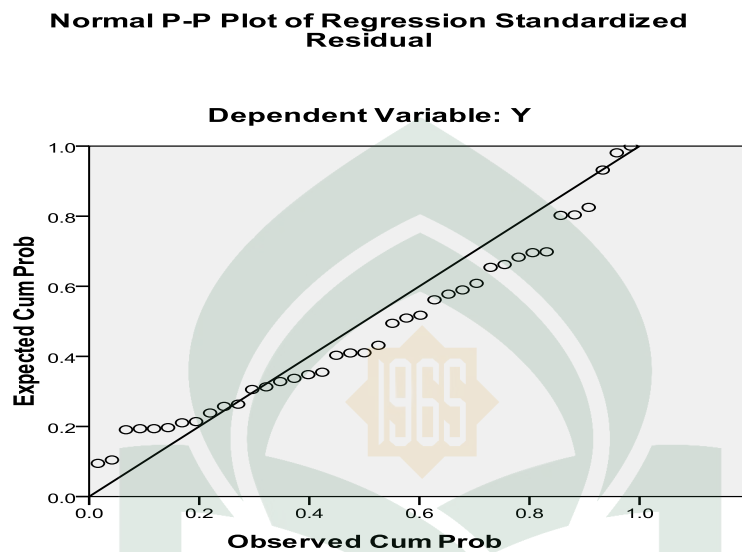
Komite audit memiliki nilai minimum adalah 0.50, nilai maksimum adalah 0.89, nilai mean adalah 0.6968, dan nilai standar deviasi adalah 0.08697. Artinya, jumlah komite audit paling kecil yang dimiliki oleh perusahaan adalah 0.50%, paling besar adalah 0.89%, rata-rata jumlah komite audit yang dimiliki oleh perusahaan adalah 0.6968%, dan standar deviasi yang menunjukkan variasi yang terdapat dalam komite audit adalah 0.08697%.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tujuan dilakukannya uji normalitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi, residual memiliki distribusi normal. Cara yang dilakukan untuk melihat normalitas adalah menggunakan normal *probability plot*, dan uji *kolmogorov-smornov (K-S)*. dalam normal *probability plot*, jika distribusi data residual normal maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya

Gambar 4.1
Uji Normalitas



Tabel 4.9
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		39
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.05617872
Most Extreme Differences	Absolute	.138
	Positive	.138
	Negative	-.126
Kolmogorov-Smirnov Z		.859
Asymp. Sig. (2-tailed)		.452

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data Sekunder diolah 2016

Gambar P- Plot diatas, kita dapat melihat bahwa sebagai titik – titik pada gambar P- Plot mengikuti arah garis diagonal dari garis diagonal, yang menunjukkan bahwa distribusi data dalam penelitian terdistribusi secara normal dan model regresi yang di uji dengan menggunakan grafik tersebut tidak memenuhi asumsi normalitas. Hasil uji statistik non-parametik *Kolmogorov-Smirnov (K-S)* menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar $0.452 > 0.05$ yang berarti dalam penelitian terdistribusi normal.

b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji *Durbin-Watson (DW-Test)*.

Tabel 4.10
Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.597 ^a	.356	.281	.05939	2.327

a. Predictors: (Constant), X4, X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Cash ETR

Sumber: Data Sekunder diolah 2016

Nilai DW sebesar 2.327 pada tingkat signifikansi 0.05, jumlah sampel (n) 39 dan jumlah variabel independen 4 ($k=4$), memberikan nilai dU (batas atas) 1.222 dan nilai dL (batas bawah) 1.726. Oleh karena nilai DW 2.327 lebih besar dari batas atas (dU) 1.222 dan kurang dari $4 - 1.222$ ($4 - dU$), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi.

c. Uji Multikoloneiritas

Uji multikoloneiritas digunakan untuk menguji apakah terdapat hubungan linear yang sempurna dan mendekati sempurna antara dua variabel independen atau lebih pada model regresi. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikoloneiritas dengan melihat nilai Tolerance dan VIF. Jika nilai Tolerance lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 10, maka tidak terjadi multikoloneiritas.

Tabel 4.11
Uji Multikoloneiritas

Coefficients ^a			
		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	KE	.585	1.709
	KI	.547	1.829
	DK	.630	1.586
	KA	.650	1.538

a. Dependent Variable: Cash ETR

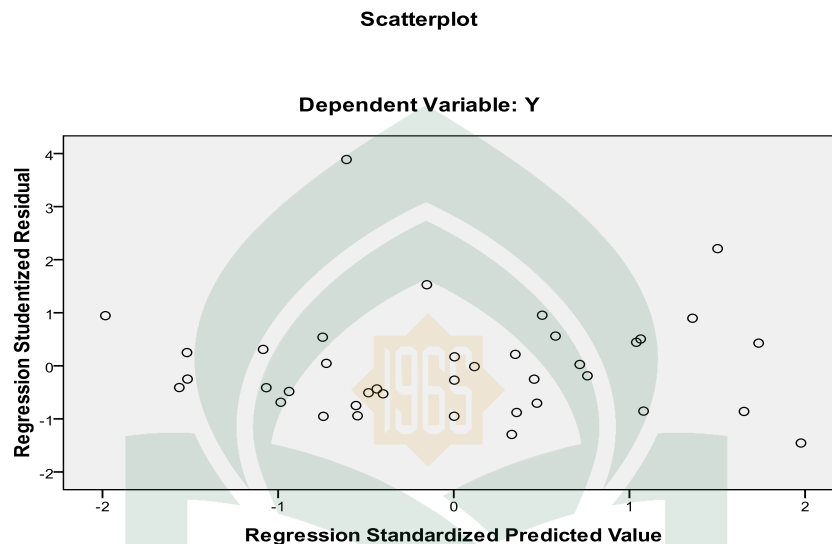
Sumber: Data Sekunder diolah 2016

Berdasarkan uji multikoloneiritas diatas, kita dapat melihat bahwa nilai Tolerance X_1 sebesar $0.585 > 0.1$ dan VIF sebesar $1.709 < 10$ yang menunjukkan bahwa pada variabel X_1 tidak terjadi masalah multikoloneiritas. Pada variabel X_2 nilai Tolerance sebesar $0.542 > 0.1$ dan VIF sebesar $1.844 < 10$ yang menunjukkan bahwa pada variabel X_2 tidak terjadi masalah multikoloneiritas. Variabel X_3 nilai Tolerance sebesar $0.633 > 0.1$ dan VIF sebesar $1.580 < 10$ yang menunjukkan bahwa pada variabel X_3 tidak terjadi masalah multikoloneiritas. X_4 memiliki nilai Tolerance sebesar $0.639 > 0.1$ dan VIF sebesar $1.566 < 10$ yang berarti tidak terjadi masalah multikoloneiritas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel tidak terjadi masalah multikoloneiritas.

d. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi. Untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas dalam penelitian yaitu melihat pola titik – titik pada scatterplots regresi. Jika titik – titik menyebar dengan pola yang tidak jelas diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi masalah heterokedastisitas.

Gambar 4.2
Uji heterokedastisitas



Sumber: Data Sekunder diolah 2016

Berdasarkan gambar diatas, kita dapat melihat bahwa titik – titik pada *scaterrplot* menyebar diantara angka 0 pada sumbu Y yang menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah heterokedastisitas.

3. Pengujian Hipotesis

a. Analisis Regresi Berganda

Regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh karakter eksekutif dan *corporate governance* terhadap penghindaran pajak. hasil analisis regresi berganda ditunjukkan sebagai berikut:

Coefficients ^a		
Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
1 (Constant)	-.443	.278
KE	.020	.009
KI	.217	.074
DK	-.064	.102
KA	.234	.137

a. Dependent Variable: Cash ETR

Sumber: Data Sekunder diolah 2016

Tabel diatas, hasil perhitungan pengaruh karakter eksekutif dan *corporate governance* terhadap penghindaran pajak didapatkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -0.443 + 0.020X_1 + 0.217X_2 + 0.064X_3 + 0.234X_4 + e$$

Hasil dari analisis tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta sebesar -0.453, artinya bahwa jika variabel karakter eksekutif, kepemilikan institusional, struktur dewan komisaris dan komite audit mempengaruhi penghindaran pajak, maka penghindaran pajak yang akan terjadi sebesar -0.453
- 2) Nilai koefisien karakter eksekutif X_1 sebesar 0.019. artinya setiap kenaikan satu satuan karakter eksekutif maka variabel Y akan naik sebesar 0.019 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

- 3) Nilai koefisien kepemilikan institusional X_2 sebesar 0.217. Artinya setiap kenaikan satu satuan kepemilikan institusional maka variabel Y akan naik sebesar 0.217 dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya dari model regresi adalah tetap.
- 4) Nilai koefisien struktur dewan komisaris X_3 sebesar 0.066. Artinya setiap kenaikan satu satuan struktur dewan komisaris maka variabel Y akan naik sebesar 0.066 dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya dari model regresi adalah tetap.
- 5) Nilai koefisien komite audit X_4 sebesar 0.235. Artinya setiap kenaikan satu satuan komite audit maka variabel Y akan naik sebesar 0.235 dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya dari model regresi adalah tetap.

b. Uji F (F Test)

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.12
Uji F (F Test)

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.066	4	.017	4.706	.004 ^a
Residual	.120	34	.004		
Total	.186	38			

a. Predictors: (Constant), KA, DK, KE, KI

b. Dependent Variable: Cash ETR

Sumber: Data Sekunder diolah 2016

Tabel 4.12 uji F dapat dilihat bahwa nilai F sebesar 4.706 dan f tabel sebesar 2.61 dengan probabilitas 0.004. karena probabilitas kurang dari 0.005 dan f hitung ($4.706 > (2.61)$), maka dapat disimpulkan bahwa variabel Karakter Eksekutif, Kepemilikan Intitusional, Struktur Dewan Komisaris dan Komite Audit secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

c. Uji Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Tabel 4.13
Uji t (t Test)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.443	.278		-1.590	.121

KE	.020	.009	.383	2.128	.041
KI	.217	.074	.547	2.941	.006
DK	-.064	.102	-.109	-.627	.535
KA	.234	.137	.290	1.701	.098

a. Dependent Variable: Cash ETR

Sumber: Data Sekunder diolah 2016

Tabel 4.13 menunjukkan variabel karakter eksekutif memiliki t hitung sebesar 2.128 dengan t tabel sebesar 2.0227 dan nilai signifikan 0.041. Nilai signifikan > 0.05 dan t hitung $> t$ tabel yang menunjukkan bahwa karakter eksekutif berpengaruh signifikan dan positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa H_1 “karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak” diterima.

Variabel kepemilikan institusional memiliki t hitung sebesar 2.941 dengan t tabel sebesar 2.0227 dan nilai signifikan 0.006. Nilai signifikan > 0.05 dan t hitung $> t$ tabel yang berarti kepemilikan institusional berpengaruh signifikan dan positif terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, H_2 “kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak” dalam penelitian ini diterima.

Variabel ukuran dewan komisaris memiliki t hitung sebesar -0.627 dengan t tabel sebesar 2.0227 dengan nilai signifikansi sebesar 0.519. nilai signifikan $0.519 > 0.05$ dan t hitung $< t$ tabel yang menunjukkan bahwa

struktur dewan komisaris berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa H_3 diterima.

Variabel ukuran komite audit memiliki t hitung sebesar 1.701 dengan t tabel sebesar 2.0227 dengan nilai signifikansi sebesar 0.099. nilai signifikan $0.099 > 0.05$ dan t hitung $< t$ tabel yang menunjukkan komite audit berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa H_4 diterima.

d. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi adalah suatu nilai yang menggambarkan seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Dengan mengetahui nilai koefisien determinasi maka dapat menjelaskan kebaikan dari model regresi dan memprediksi variabel dependen. Semakin tinggi nilai determinasi akan semakin baik kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.³

Analisis koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk mengetahui seberapa besar presentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen.⁴

³ Purbayu Budi Santosa dan Ashari, *Analisis Statistik dengan Microsoft Excel dan SPSS*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2005), h.144.

⁴ Duwi, Priyatno. *Analisis Korelasi, Regresi dan Multivariate dengan SPSS* (Yogyakarta: Gava Media, 2013)

Tabel 4.14
Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.597 ^a	.356	.281	.05939

a. Predictors: (Constant), X4, X3, X1, X2

Sumber: Data Sekunder diolah 2016

Tabel diatas menunjukkan nilai R sebesar 0,597. Menurut pedoman interpretasi koefisien korelasi, angka ini termasuk dalam kategori korelasi berpengaruh sedang karena berada pada interval 0,40 – 0,5999. Hal ini menunjukka bahwa karakter eksekutif dan *good corporate governance* berpengaruh sedang terhadap penghindaran pajak.

Tabel diatas menunjukkan nilai dari adjusted R^2 adalah 0.281, hal ini berarti 28.1% variasi Penghindaran Pajak dapat dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel independen yaitu Karakter Eksekutif, Kepemilikan institusional, Struktur Dewan Komisaris dan Komite Audit. Sedangkan sisanya 71.9% dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model.

Nilai koefisien determinasi (R^2) adalah antara nol dan satu, nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen amat terbatas, sedangkan nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hamper semua informasi yang

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.⁵ Sedangkan koefisien korelasi (R) merupakan akar dari koefisien determinasi, besarnya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain, besarnya koefisien korelasi akan berkisar antara -1 (negatif satu) sampai +1 (positif satu), apabila koefisien korelasi mendekati +1 atau -1 berarti hubungan antarvariabel tersebut semakin kuat, sebaliknya apabila koefisien korelasi mendekati angka 0, berarti hubungan antarvariabel tersebut semakin lemah.⁶

F. Pembahasan

1. Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan uji t (parsial) diperoleh hasil bahwa karakter eksekutif memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya apabila eksekutif semakin bersifat *risk taker* maka akan semakin besar tindakan *tax avoidance* yang dilakukan. Besar kecilnya risiko perusahaan mengindikasikan kecenderungan karakter eksekutif. Tingkat risiko yang besar menunjukkan bahwa pimpinan perusahaan lebih bersifat *risk taker* yang lebih berani mengambil risiko. Sebaliknya tingkat risiko yang kecil menunjukkan bahwa pimpinan perusahaan lebih bersifat *risk averse* yang cenderung untuk menghindari risiko.

⁵ Imam Ghazali. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013)

⁶ Blog MIPA (Matematika dan Ilmu pengetahuan Alam), “ Koefisien Determinasi dan Koefisien Korelasi”, (Maret 2012) <http://blogmipa.blogspot.co.id>, (15 Februari 2016).

Naik-turunya CASH ETR mengindikasikan naik-turunya tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*). Tingkat CASH ETR yang meningkat atau naik mengindikasikan adanya penurunan atau berkurangnya tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*), sebaliknya jika CASH ETR turun atau berkurang mengindikasikan adanya kenaikan atau peningkatan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Calvin dan I Made⁷ yang mana hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, dan penelitian dari Judi dan Setiono⁸ dimana karakter eksekutif berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, H₁ “karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak” diterima.

2. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan uji t (parsial) diperoleh hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya, pemilik institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi seorang manajer, sehingga berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki oleh pemilik institusional dapat memberikan arahan kepada manajer

⁷ Calvin Singly dan I Made Sukartha, “Pengaruh karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage* dan *Sales Growth* pada *Tax Avoidance*”, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*10 no. 1 (2015): h. 52.

⁸ Judi Budiman dan Setiyono, “Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (*tax avoidance*)”. *Symposium Nasional Akuntansi 15: Banjarmasin*, (2012). h.15.

untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk berperilaku meguntungkan diri sendiri.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hashemi yang menyatakan bahwa investor insitusional sebagai pengawas yang berasal dari eksternal akan mendorong manajemen perusahaan dengan melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan agar dalam menghasilkan laba berdasarkan aturan yang berlaku, karena pada dasarnya investor institusional lebih melihat seberapa jauh manajemen taat kepada aturan dalam menghasilkan laba, sehingga terdapat indikasi bahwa investor institusional mempunyai andil dalam menetapkan kebijakan yang terkait tingkat pajak efektif.⁹ Oleh karena itu H₃ “kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak” diterima.

3. Pengaruh Struktur Dewan Komisaris terhadap Penghindaran Pajak

Hasil perhitungan *good corporate governace* dengan menggunakan indikator struktur dewan komisaris memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, hal ini berarti bahwa struktur dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, yang berarti keberadaan dewan komisaris tidak efektif dalam mencegah tindakan

⁹ Hashemi Rodhian Hanum, “Pengaruh Karakteristik *Corporate Governance* terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) Studi Empiris pada BUMN yang terdaftar di BEI selama Periode Tahun 2009-2011”, *Skripsi* (Diponegoro: Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 2013). h.53.

penghindaran pajak. struktur dewan komisaris pada perusahaan mungkin hanya untuk memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Annisa yang menyatakan bahwa banyak sedikitnya jumlah dewan komisaris dalam suatu perusahaan tidak secara signifikan mempengaruhi penurunan aktivitas penghindaran pajak perusahaan tersebut, banyak atau sedikitnya jumlah dewan komisaris dalam suatu perusahaan bukanlah menjadi faktor penentu utama dari efektivitas pengawasan terhadap manajemen perusahaan, sehingga dapat ditarik garis merah bahwa efektivitas mekanisme pengendalian aktivitas penghindaran pajak tergantung pada nilai, norma dan kepercayaan yang diterima dalam suatu perusahaan.¹⁰

4. Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Perhitungan variabel komite audit diperoleh hasil bahwa komite audit berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki komite audit akan lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan karena komite audit akan memonitor segala kegiatan perusahaan yang berlangsung.

Komite audit berfungsi memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan internal perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

¹⁰ Nuralifmida. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance* (Studi Pada Perusahaan Terdaftar di BEI Tahun 2004). Skripsi Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2011) h.80.

Hashemi yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.¹¹ Oleh karena itu, H₄ “komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak” diterima.



¹¹ Hashemi Rodhian Hanum, “Pengaruh Karakteristik *Corporate Governance* terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) Studi Empiris pada BUMN yang terdaftar di BEI selama Periode Tahun 2009-2011”, *Skripsi* (Diponegoro: Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 2013), h.55.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis yang dilakukan pada Perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2012-2014 tentang pengaruh Karakter Eksekutif dan *Good Corporate Governance* terhadap penghindaran pajak dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak. berdasarkan uji t (parsial), diperoleh hasil bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, yang berarti bahwa besar kecilnya risiko perusahaan mengindikasikan kecenderungan karakter eksekutif. Tingkat risiko yang besar menunjukkan bahwa pimpinan perusahaan lebih bersifat *risk taker* yang lebih berani mengambil risiko. Sebaliknya tingkat risiko yang kecil menunjukkan bahwa pimpinan perusahaan lebih bersifat *risk averse* yang cenderung untuk menghindari risiko.
2. Pengaruh *Good Corporate Governance* dengan proksi kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. berdasarkan hasil uji t (parsial), diperoleh hasil bahwa *Good Corporate Governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, yang berarti pemilik institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi seorang

manajer, sehingga berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki oleh pemilik institusional dapat memberikan arahan kepada manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk berperilaku menguntungkan diri sendiri.

3. Pengaruh *Good Corporate Governance* dengan proksi struktur dewan komisaris berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap penghindaran pajak yang berarti bahwa struktur dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, yang berarti keberadaan dewan komisaris tidak efektif dalam mencegah tindakan penghindaran pajak. struktur dewan komisaris pada perusahaan mungkin hanya untuk memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Pengaruh *Good Corporate Governance* dengan proksi komite audit berpengaruh tidak signifikan dan positif terhadap penghindaran pajak, yang berarti bahwa struktur dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, yang berarti keberadaan dewan komisaris tidak efektif dalam mencegah tindakan penghindaran pajak. struktur dewan komisaris pada perusahaan mungkin hanya untuk memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

B. Keterbatasan dan Saran

1. Keterbatasan

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Penelitian ini menguji pengaruh karakter eksekutif dan good corporate governance terhadap penghindaran pajak. Dari hasil uji determinasi terlihat bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen hanya sebesar 28,1% sehingga 71,9% dipengaruhi oleh variabel lain.
- b. pemilihan sampel atau objek penelitian yang digunakan hanya berkisar pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014.
- c. Penelitian ini hanya menguji pengaruh karakter eksekutif, kepemilikan institusional, struktur dewan komisaris, dan komite audit terhadap penghindaran pajak.
- d. Tingkat penghindaran pajak hanya dilihat dari laporan keuangan tahunan yang dilaporkan oleh perusahaan property dan real estate pada tahun 2012-2014. Hal ini disebabkan keterbatasan waktu peneliti dalam penelitian ini.

2. Saran

Dari keterbatasan penelitian yang telah diungkapkan maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

- a. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah rentang waktu penelitian minimal 5 tahun untuk dapat benar-benar melihat perilaku perusahaan terkait tingkat penghindaran pajak. selain itu, sampel bias

diperluas mencakup sektor-sektor lainnya selain sektor property dan real estate.

- b. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi tingkat penghindaran pajak diluar variabel dari penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Adebisi, J.F, Ph.D dan Gbegi, D.O. 2013. Effect of Tax Avoidance and Tax Evasion on Personal Income Tax Administration in Nigeria. *American Journal of Humanities and Social Sciences*: 1-10.
- Agoes, Sukrisno dan I Cenik Ardana, *Etika Bisnis dan profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya – Edisi Revisi* (Jakarta: Salemba Empat, 2014).
- Annisa, Nuralifmida Ayu dan Lulus Kurniasih. 2012. Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*. Vol. 8, No. 2. Mei 2012: 123-136.
- Annisa, Nuralifmida Ayu. 2011. Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Terdaftar di BEI Tahun 2004). *Skripsi Surakarta : Universitas Sebelas Maret*: 1-85.
- AriesQ Alq. Hukum Pajak dalam perspektif Islam oleh KH. Tb. Ahmad Rifqi Chowas. <http://www.buntetpesantren.org/2014/04/hukum-pajak-dalam-perspektif-islam-oleh.html>. Diakses tanggal 16 April 2015.
- Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Dewan Komisaris. <http://www.baepam.go.id/>. Diakses Tanggal 1 Juni 2015.
- Badan Pusat Statistik. Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah). <http://www.bps.go.id/index.php/linkTabelStatis/1286>. Diakses tanggal 6 Mei 2015.
- Bandyopadhyay, Sankhanath. 2012. The Problem with Tax: Planning, Avoidance, and Evasion?: 1-16.
- Blog MIPA (Matematika dan Ilmu pengetahuan Alam). 2012. Koefisien Determinasi dan Koefisien Korelasi. <http://blogmipa.blogspot.co.id>, (15 Februari 2016).
- Budiman, Judi. 2012. Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). *Simposium Nasional Akuntansi 15 Banjarmasin*: 1-22.

- Chasbiandani, Tryas dan Dwi Martani. 2012. Pengaruh *Tax Avoidance* jangka panjang terhadap nilai perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi 15 Banjarmasin*: 1-27.
- Dewi, Ni NyomanKristiana dan I Ketut Jati. 2014. Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada *Tax Avoidance* di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 6, no.2 (2014): h.249-260.
- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. *Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*. (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2009)
- Direktorat Jendral Pajak. <http://www.pajak.go.id>. Diakses tanggal 10 Oktober 2014.
- Dyrenge, Scott D., Michelle Hanlon dan Edward L. Maydew. 2010. The Effect of executive on Corporate Tax Avoidance, *The Accounting review*, Vol. 85, No. 24: 1163-1189.
- Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013)
- Hanum, hashemi Rodhian. 2013. Pengaruh Karakteristik *Corporate Governance* terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) Studi Empiris pada BUMN yang terdaftar di BEI selama Tahun 2009-2011. *Skripsi* Diponegoro : Universitas Diponegoro: 1-88.
- Indonesia Stock Exchange. Profil Perusahaan Tercatat. <http://www.idx.co.id/id-id/beranda/perusahaantercatat/profilperusahaantercatat.aspx>. (Diakses Tanggal 15 Januari 2016)
- Indriantoro, Nur dan Supomo Bambang. *Metodologi penelitian Bisnis*. (BPFE: Yogyakarta, 2014)
- Katz, Sharon, Urooj Khan dan Andrew P. Schmidt. 2013. Tax Avoidance and Future Profitability: 1-54

- Kim, Jeong Bon., Oliver Zhen Li dan Yinghua Li. 2010. Corporate Tax Avoidance and Bank Loan Contracting: 1-55.
- Masri, Indah dan Dwi Martani. 2012. Pengaruh Tax Avoidance terhadap Cost of Debt. *Simposium Nasional Akuntansi 15 Banjarmasin*: 1-27.
- Monica, Virginia dan Carmel Meiden. 2013. Persistensi Laba dan perubahan Harga Saham yang Dicerminkan oleh Laba, Akrua, Arus Kas Dimoderasi Book Tax Differences. *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4*: 1-17.
- Ordower, Hendry. 2010. The Culture of Tax Avoidance. *Legal Studies Research Paper Series*: 1-67.
- Pohan, Hotman Tohir. 2010. Pengaruh Good Corporate Governance, Rasio Tobin Q, Perata Laba Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Publik. <http://hotmanpohan.blogspot.com/2010/09/penelitian-hubungan-gcg-dengan-tax.html>. diakses pada tanggal 3 Januari 2015.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2014. Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi 17 Mataram, Lombok*; 1-27.
- Prasetyo, Bambang dan Jannah Lina Miftahul. Metode Penelitian Kuantitatif. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)
- Priyanto, Duwi. Analisis Korelasi, Regresi dan Multivariate dengan SPSS. (Yogyakarta: Gava Media, 2013)
- Pujiati, “Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Kesempatan Investasi terhadap Kebijakan Dividen dengan Likuiditas sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2013)” *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), h.1-180.
- Puspita, Silvia Ratih. 2014. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi terhadap Perusahaan Non-Keluarga yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012). *Skripsi Semarang* : Universitas Diponegoro: 1-125

- Qudratullah, Farhan. Analisis Regresi Terapan, teori, Contoh Kasus dan Aplikasi dengan SPSS. (Yogyakarta: Andi, 2012)
- Rachmithasari, Annisa Fadilla. 2015. Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance (Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013). *Naskah Publikasi* Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta: 1-19
- Sihombing, Silvia dan Rika Lidyah. Analisis Koreksi Fiskal PPh Badan dalam Meminimalisir Pajak Terutang PT. Anugerah Mega Lestari, t.th.
- Santoso, Purbayu Budi dan Ashari. Analisis Statistic dengan Microsoft Exel dan SPSS. (Yogyakarta: Andi, 2005)
- Sugioyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Sujawerni, V. Wiranata. SPSS Untuk penelitian. (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014)
- Swingly, Calvin. 2015. Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran perusahaan, *Leverage*, dan *Sales Growth* pada *Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*10, no.1: 47-62.
- Wahyono, Budi. 2012. Olah Data Statistik. <http://dataolah.blogspot.com/2012/07/v-behaviorurldefaultvmlo.html>. diakses tanggal 10 Januari 2015.
- Wijaya, Ibnu. 2014. Mengenal penghindaran pajak. *Artikel Pajak*.
- Wongso, Felix Daniel, Jantje Tinangon dan Stanley Walandouw. Analisis Koreksi Fiskal dalam Rangka Perhitungan PPh badan PT. Kawanua Dasa Pratama. t.th: h. 103-113

Lampiran 1

**DAFTAR POPULASI PERUSAHAAN
SEKTOR *PROPERTY* DAN *REAL ESTATE*
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
PERIODE 2012-2014**

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	APLN	Agung Podomoro Land Tbk.
2	ASRI	Alam Sutera Realty Tbk.
3	BAPA	Bekasi Asri Pemula Tbk.
4	BCIP	Bumi Citra Permai Tbk.
5	BEST	Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk.
6	BIPP	Bhuwanatala Indah Permai Tbk.
7	BKDP	Bukit Darmo Property Tbk.
8	BKSL	Sentul City Tbk.
9	BSDE	Bumi SERpong Damai Tbk.
10	COWL	Cowell Development Tbk.
11	CTRA	Ciputra Development Tbk.
12	CTRP	Ciputra Property Tbk.
13	CTRS	Ciputra Surya Tbk.
14	DART	Duta Anggada Realty Tbk.
15	DILD	Intialand Development Tbk.
16	DUTI	Duta Pertiwi Tbk.
17	ELTY	Bakrieland Development Tbk.
18	EMDE	Megapolitan Development Tbk.
19	FMII	Fortune Mate Indonesia Tbk.
20	GAMA	Gading Development Tbk.
21	GMTD	Gowa Makassar Tourism Development Tbk.
22	GPRA	Perdana Gapura Prima Tbk.
23	GWSA	Greenwood Sejahtera Tbk.
24	JRPT	Jaya Real Property Tbk.
25	KIJA	Kawasan Industri Jababeka Tbk.
26	KPIG	MNC Land Tbk.
27	LAMI	Lamicitra Nusantara Tbk.
28	LCGP	Eureka Prima Jakarta Tbk.
29	LPCK	Lippo Cikarang Tbk.
30	LPKR	Lippo Karawaci Tbk.
31	MDLN	Modernland Realty Ltd. Tbk.
32	MKPI	Metropolitan Kentjana Tbk.
33	MTLA	Metropolitan Land Tbk.

34	MTSM	Metro Realty Tbk.
35	NIRO	Nirvana Development Tbk.
36	MORE	Indonesia Prima Property Tbk.
37	PLIN	Plaza Indonesia realty Tbk.
38	PUDP	Pudjiaji Prestige Tbk.
39	PWON	Pakuwon Jati Tbk.
40	RBMS	Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk.
41	RDTX	Roda Vivatex Tbk.
42	RODA	Pikko Land Development Tbk.
43	SMDM	Suryamas Dutamakmur Tbk.
44	SMRA	Summarecon Agung Tbk.
45	TARA	Sitara Propertindo Tbk.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R

Lampiran 2

**DAFTAR SAMPEL PERUSAHAAN
SEKTOR *PROPERTY* DAN *REAL ESTATE*
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
PERIODE 2012-2014**

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	APLN	PT Agung Podomoro Land Tbk.
2	ASRI	PT Alam Sutera Realty Tbk.
3	BAPA	PT Bekasi Asri Pemula Tbk.
4	BCIP	PT Bumi Citra Permai Tbk.
5	COWL	PT Cowell Development Tbk.
6	DART	PT Duta Anggada Realty Tbk.
7	GMTD	PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk.
8	GPRA	PT Perdana Gapura prima tbk.
9	JRPT	PT Jaya Real Property Tbk.
10	LAMII	PT Lamicitra Nusantara Tbk.
11	LPCK	PT Lippo Cikarang Tbk.
12	PUDP	PT Pudjiaji Prestige Tbk.
13	PWON	PT Pakuwon Jati Tbk.

Lampiran 3

DATA CASH ETR

$$CASH\ ETR = \frac{Pembayaran\ Pajak}{Laba\ Sebelum\ Pajak}$$

1. Data CASH ETR Tahun 2012

No	Kode Perusahaan	Pembayaran Pajak	Laba Sebelum Pajak	CASH ETR
1	APLN	256,255,978.00	1,097,546,731.00	0.23
2	ASRI	128,103,048.00	1,344,194,587.00	0.10
3	BAPA	1,001,862,264.00	5,489,991,264.00	0.18
4	BCIP	5,625,564,899.00	15,116,583,369.00	0.37
5	COWL	15,614,039,311.00	85,289,192,235.00	0.18
6	DART	59,206,578.00	240,034,830.00	0.25
7	GMTD	12,210,436,247.00	76,583,527,140.00	0.16
8	GPRA	21,453,041,425.00	77,734,544,649.00	0.28
9	JRPT	63,447,626.00	491,372,623.00	0.13
10	LAMII	8,258,094.00	50,369,050.00	0.16
11	LPCK	50,583,453,848.00	457,605,362,145.00	0.11
12	PUDP	3,113,866,915.00	24,251,842,916.00	0.13
13	PWON	134,608,929.00	901,104,834.00	0.15

2. Data CASH ETR Tahun 2013

No	Kode Perusahaan	Pembayaran Pajak	Laba Sebelum Pajak	CASH ETR
1	APLN	246,935,002.00	1,177,175,519.00	0.21
2	ASRI	192,199,233.00	1,081,775,829.00	0.18
3	BAPA	1,769,234,088.00	6,794,971,239.00	0.26
4	BCIP	9,793,573,415.00	42,483,580,941.00	0.23
5	COWL	27,899,878,534.00	76,611,799,917.00	0.36
6	DART	60,651,706.00	241,451,997.00	0.25
7	GMTD	15,277,424,710.00	107,122,701,371.00	0.14
8	GPRA	24,005,730,756.00	130,517,196,097.00	0.18
9	JRPT	85,394,878.00	631,664,497.00	0.14
10	LAMII	7,915,412.00	62,255,431.00	0.12
11	LPCK	75,065,688,080.00	665,682,618,221.00	0.11
12	PUDP	2,981,152,001.00	29,360,040,592.00	0.10
13	PWON	194,644,175.00	1,331,191,716.00	0.15

3. Data CASH ETR Tahun 2014

No	Kode Perusahaan	Pembayaran Pajak	Lab a Sebelum Pajak	CASH ETR
1	APLN	245,821,925.00	1,229,697,293.00	0.20
2	ASRI	208,811,531.00	1,385,766,654.00	0.15
3	BAPA	2,411,407,529.00	9,457,913,326.00	0.25
4	BCIP	11,541,339,830.00	42,054,967,694.00	0.27
5	COWL	41,443,383,617.00	206,840,425,068.00	0.20
6	DART	87,009,186.00	495,117,812.00	0.18
7	GMTD	15,977,839,254.00	135,978,034,837.00	0.12
8	GPRA	36,622,033,775.00	128,223,105,923.00	0.29
9	JRPT	108,065,648.00	822,596,711.00	0.13
10	LAMII	8,870,825.00	47,259,905.00	0.19
11	LPCK	98,170,839,604.00	942,294,098,501.00	0.10
12	PUDP	1,665,566,066.00	16,717,276,007.00	0.10
13	PWON	260,164,669.00	2,859,305,685.00	0.09

Lampiran 4

DATA RISIKO PERUSAHAAN

$$RISK = \sqrt{\frac{\sum_{T=1}^T (E - \frac{1}{T} \sum_{T=1}^T E)^2}{T - 1}}$$

1. Data Risiko Perusahaan Tahun 2012

No	Kode Perusahaan	Total Aset	Risk	LN
1	APLN	15,195,642,352.00	9,431,590.57	16.06
2	ASRI	10,946,417,244.00	8,005,001.30	15.90
3	BAPA	159,093,151,873.00	30,517,654.43	17.23
4	BCIP	341,565,287,503.00	44,715,930.00	17.62
5	COWL	1,778,428,912,031.00	102,033,706.44	18.44
6	DART	4,293,161,447.00	5,013,188.31	15.43
7	GMTD	900,597,066,316.00	72,609,032.04	18.10
8	GPRA	1,310,251,294,004.00	87,579,549.43	18.29
9	JRPT	4,998,260,900.00	5,409,222.79	15.50
10	LAMII	614,717,410.00	1,896,981.80	14.46
11	LPCK	2,832,000,551,101.00	90,498,474.34	18.32
12	PUDP	361,178,839,947.00	45,981,862.38	17.64
13	PWON	7,565,819,916.00	6,654,202.27	15.71

2. Data Risiko Perusahaan Tahun 2013

No	Kode Perusahaan	Total Aset	Risk	LN
1	APLN	19,679,908,990.00	10,733,391.00	16.19
2	ASRI	14,428,082,567.00	9,190,300.62	16.03
3	BAPA	179,635,233,972.00	32,428,075.08	17.29
4	BCIP	432,316,712,637.00	50,306,768.00	17.73
5	COWL	1,944,913,754,306.00	106,702,742.46	18.49
6	DART	4,768,449,638.00	5,283,406.28	15.48
7	GMTD	1,307,846,871,186.00	87,499,154.56	18.29
8	GPRA	1,332,646,538,409.00	88,324,847.38	18.30
9	JRPT	6,163,177,866.00	6,006,586.82	15.61
10	LAMII	612,074,724.00	1,892,889.82	14.45
11	LPCK	3,854,166,345,345.00	150,207,160.15	18.83
12	PUDP	366,625,848,156.00	46,276,470.21	17.65
13	PWON	9,298,245,408.00	7,377,783.56	15.81

3. Data Risiko Perusahaan Tahun 2014

No	Kode Perusahaan	Total Aset	Risk	LN
1	APLN	23,686,158,211.00	11,775,449.30	16.28
2	ASRI	16,924,366,954.00	9,953,633.01	16.11
3	BAPA	176,171,620,663.00	32,102,802.85	17.28
4	BCIP	590,329,940,916.00	58,785,851.00	17.89
5	COWL	3,682,393,492,170.00	146,821,786.00	18.80
6	DART	5,114,273,658.00	5,471,638.41	15.52
7	GMTD	1,524,317,546.00	94,463,293.93	18.36
8	GPRA	1,517,576,344,888.00	94,254,193.60	18.36
9	JRPT	6,684,262,908.00	6,255,358.00	15.65
10	LAMII	631,395,724.00	1,902,143.02	14.46
11	LPCK	4,309,824,234,265.00	158,838,284.30	18.88
12	PUDP	401,794,311,717.00	48,498,387.59	17.70
13	PWON	16,770,742,538.00	9,908,354.90	16.11

Lampiran 5

DATA KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL

$$\text{proporsi kepemilikan institusi} = \frac{\sum \text{Saham Institusi}}{\sum \text{Jumlah Saham Beredar}} \times 100\%$$

1. Data Kepemilikan Institusional Tahun 2012

No	KP	JSI	JSB	100%	PKI
1	APLN	13,743,780,000.00	20,500,900,000.00	100%	0.67
2	ASRI	9,234,191,000.00	19,649,411,888.00	100%	0.47
3	BAPA	462,738,000.00	661,784,520.00	100%	0.70
4	BCIP	749,750,000.00	1,428,935,000.00	100%	0.52
5	COWL	4,614,951,743.00	4,871,214,278.00	100%	0.95
6	DART	2,816,813,812.00	3,141,390,962.00	100%	0.90
7	GMTD	66,000,000.00	101,538,000.00	100%	0.65
8	GPRA	2,654,460,507.00	3,207,491,502.00	100%	0.83
9	JRPT	2,088,815,000.00	2,750,000,000.00	100%	0.76
10	LAMII	1,066,687,992.00	1,148,418,000.00	100%	0.93
11	LPCK	293,706,000.00	696,000,000.00	100%	0.42
12	PUDP	137,170,880.00	308,000,000.00	100%	0.45
13	PWON	33,890,130,800.00	48,159,602,400.00	100%	0.70

2. Data Kepemilikan Institusional Tahun 2013

No	KP	JSI	JSB	100%	PKI
1	APLN	13,743,780,000.00	20,500,900,000.00	100%	0.67
2	ASRI	10,179,956,000.00	19,649,411,888.00	100%	0.52
3	BAPA	424,620,000.00	661,784,520.00	100%	0.64
4	BCIP	749,750,000.00	1,429,915,525.00	100%	0.52
5	COWL	4,150,567,243.00	4,871,214,021.00	100%	0.85
6	DART	2,816,813,812.00	3,141,390,962.00	100%	0.90
7	GMTD	66,000,000.00	101,538,000.00	100%	0.65
8	GPRA	3,624,129,349.00	4,276,655,336.00	100%	0.85
9	JRPT	10,440,075,000.00	13,750,000,000.00	100%	0.76
10	LAMII	1,066,687,992.00	1,148,418,000.00	100%	0.93
11	LPCK	293,706,000.00	696,000,000.00	100%	0.42
12	PUDP	146,772,841.00	329,560,000.00	100%	0.45
13	PWON	25,129,459,200.00	48,159,602,400.00	100%	0.52

3. Data Kepemilikan Institusional Tahun 2014

No	KP	JSI	JSB	100%	PKI
1	APLN	13,743,780,000.00	20,500,900,000.00	100%	0.67
2	ASRI	10,115,790,364.00	19,649,411,888.00	100%	0.51
3	BAPA	508,842,500.00	661,784,520.00	100%	0.77
4	BCIP	1,359,793,425.00	1,429,915,525.00	100%	0.95
5	COWL	4,150,567,243.00	4,871,214,021.00	100%	0.85
6	DART	2,816,813,812.00	3,141,390,962.00	100%	0.90
7	GMTD	66,000,000.00	101,538,000.00	100%	0.65
8	GPRA	3,574,669,155.00	4,276,655,336.00	100%	0.84
9	JRPT	10,482,648,500.00	13,750,000,000.00	100%	0.76
10	LAMII	1,066,687,992.00	1,148,418,000.00	100%	0.93
11	LPCK	293,706,000.00	696,000,000.00	100%	0.42
12	PUDP	146,772,841.00	329,560,000.00	100%	0.45
13	PWON	27,738,526,730.00	48,159,602,400.00	100%	0.58

Keterangan:

KP : Kode Perusahaan

JSI : Jumlah Saham Institusi

JSB : Jumlah Saham Beredar

PKI : Proporsi Kepemilikan Institusi

Lampiran 6

DATA STRUKTUR DEWAN KOMISARIS

$$\text{proporsi komisaris independen} = \frac{\sum \text{komisaris independen}}{\sum \text{anggota dewan komisaris}} \times 100\%$$

1. Data Struktur Dewan Komisaris Tahun 2012

No	Kode Perusahaan	Komisaris Independen	Anggota Dewan Komisaris	100 %	Struktur Dewan Komisaris
1	APLN	1	3	100%	0.33
2	ASRI	2	5	100%	0.40
3	BAPA	1	3	100%	0.33
4	BCIP	1	3	100%	0.33
5	COWL	1	3	100%	0.33
6	DART	1	3	100%	0.33
7	GMTD	2	10	100%	0.20
8	GPRA	1	3	100%	0.33
9	JRPT	2	5	100%	0.40
10	LAMII	1	3	100%	0.33
11	LPCK	3	6	100%	0.50
12	PUDP	2	3	100%	0.67
13	PWON	2	3	100%	0.67

2. Data Struktur Dewan Komisaris Tahun 2013

No	Kode Perusahaan	Komisaris Independen	Anggota Dewan Komisaris	100 %	Struktur Dewan Komisaris
1	APLN	1	3	100%	0.33
2	ASRI	2	5	100%	0.40
3	BAPA	1	3	100%	0.33
4	BCIP	1	3	100%	0.33
5	COWL	1	3	100%	0.33
6	DART	1	3	100%	0.33
7	GMTD	2	10	100%	0.33
8	GPRA	1	3	100%	0.33
9	JRPT	2	5	100%	0.40
10	LAMII	1	3	100%	0.33
11	LPCK	3	6	100%	0.57
12	PUDP	2	3	100%	0.67
13	PWON	2	3	100%	0.67

3. Data Struktur Dewan Komisaris Tahun 2014

No	Kode Perusahaan	Komisaris Independen	Anggota Dewan Komisaris	100 %	Struktur Dewan Komisaris
1	APLN	1	3	100%	0.33
2	ASRI	2	5	100%	0.33
3	BAPA	1	3	100%	0.40
4	BCIP	1	3	100%	0.33
5	COWL	1	3	100%	0.33
6	DART	1	3	100%	0.33
7	GMTD	2	10	100%	0.38
8	GPRA	1	3	100%	0.33
9	JRPT	2	5	100%	0.40
10	LAMII	1	3	100%	0.33
11	LPCK	3	6	100%	0.33
12	PUDP	1	3	100%	0.33
13	PWON	2	3	100%	0.67

Lampiran 7

DATA KOMITE AUDIT

$$\text{Komite Audit} = \frac{\sum \text{komite audit diluar komisariss independen}}{\sum \text{seluruh komite audit perusahaan}} \times 100\%$$

1. Data Komite Audit Tahun 2012

No	Kode Perusahaan	Komite Audit di luar Komisaris Independen	Seluruh Komite Audit Perusahaan	100%	Komite Audit
1	APLN	7	8	100%	0.88
2	ASRI	6	7	100%	0.86
3	BAPA	2	3	100%	0.67
4	BCIP	2	3	100%	0.67
5	COWL	2	3	100%	0.67
6	DART	4	5	100%	0.80
7	GMTD	2	3	100%	0.67
8	GPRA	1	2	100%	0.50
9	JRPT	2	3	100%	0.67
10	LAMII	2	3	100%	0.67
11	LPCK	2	3	100%	0.67
12	PUDP	2	3	100%	0.67
13	PWON	2	3	100%	0.67

2. Data Komite Audit Tahun 2013

No	Kode Perusahaan	Komite Audit di luar Komisaris Independen	Seluruh Komite Audit Perusahaan	100%	Komite Audit
1	APLN	8	9	100%	0.89
2	ASRI	4	5	100%	0.80
3	BAPA	2	3	100%	0.67
4	BCIP	2	3	100%	0.67
5	COWL	2	3	100%	0.67
6	DART	4	5	100%	0.80
7	GMTD	2	3	100%	0.67
8	GPRA	1	2	100%	0.50
9	JRPT	2	3	100%	0.67
10	LAMII	2	3	100%	0.67
11	LPCK	2	3	100%	0.67
12	PUDP	2	3	100%	0.67
13	PWON	2	3	100%	0.67

3. Data Komite Audit Tahun 2014

No	Kode Perusahaan	Komite Audit di luar Komisaris Independen	Seluruh Komite Audit Perusahaan	100%	Komite Audit
1	APLN	8	9	100%	0.89
2	ASRI	4	5	100%	0.80
3	BAPA	2	3	100%	0.67
4	BCIP	2	3	100%	0.67
5	COWL	2	3	100%	0.67
6	DART	4	5	100%	0.80
7	GMTD	2	3	100%	0.67
8	GPRA	2	3	100%	0.67
9	JRPT	2	3	100%	0.67
10	LAMII	2	3	100%	0.67
11	LPCK	2	3	100%	0.67
12	PUDP	2	3	100%	0.67
13	PWON	2	3	100%	0.67

Lampiran 8

HASIL PERHITUNGAN SPSS

1. Analisis Deskriptif Statistik

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
X1	39	14.45	18.88	660.26	16.9298	1.36131
X2	39	.42	.95	26.90	.6896	.17626
X3	39	.20	.67	15.38	.3943	.11931
X4	39	.50	.89	27.17	.6968	.08697
Y	39	.09	.37	6.96	.1783	.07002
Valid N (listwise)	39					

Sumber: Data yang telah diolah

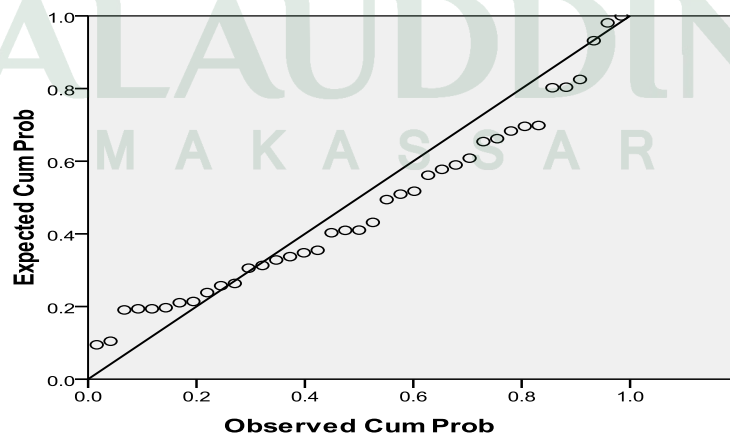
2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

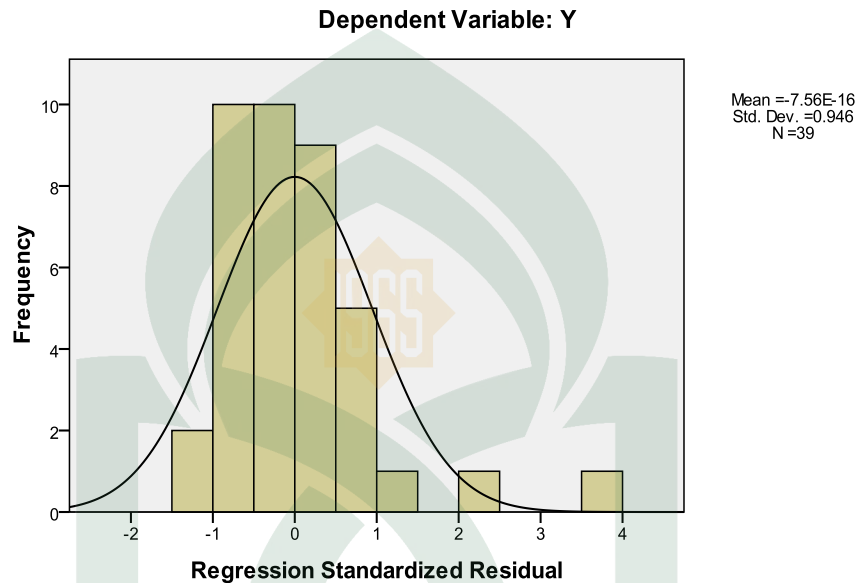
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Dependent Variable: Y



Histogram



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		39
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.05617872
Most Extreme Differences	Absolute	.138
	Positive	.138
	Negative	-.126
Kolmogorov-Smirnov Z		.859
Asymp. Sig. (2-tailed)		.452

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data yang telah diolah

b. Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.597 ^a	.356	.281	.05939	2.327

a. Predictors: (Constant), X4, X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data yang telah diolah

c. Uji Multikoloneiritas

Coefficients^a

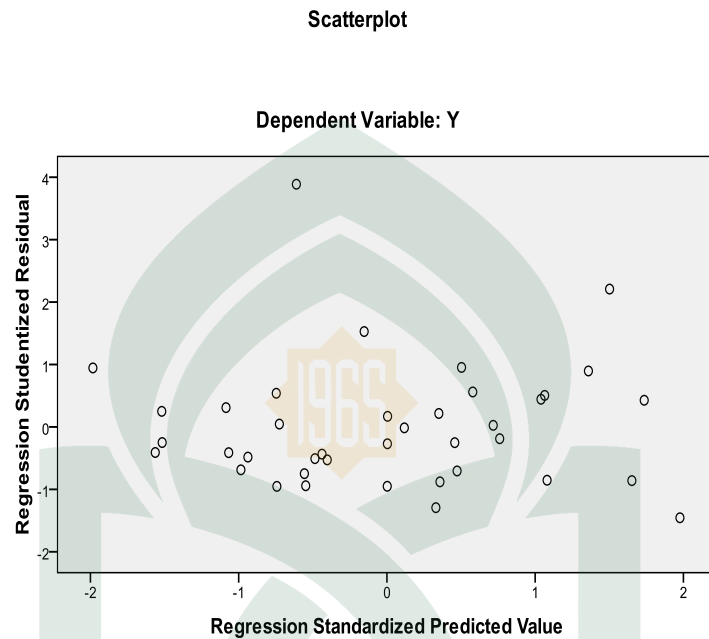
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
X1	.585	1.709
X2	.547	1.829
X3	.630	1.586
X4	.650	1.538

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data yang telah diolah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

d. Uji Heterokedastisitas



Sumber: Data yang telah diolah

3. Pengujian Hipotesis

a. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.597 ^a	.356	.281	.05939

a. Predictors: (Constant), X4, X3, X1, X2

Sumber: Data yang telah diolah

b. Hasil Uji Simultan (Test F)

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.066	4	.017	4.706	.004 ^a
Residual	.120	34	.004		
Total	.186	38			

a. Predictors: (Constant), X4, X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data yang telah diolah

c. Hasil Uji Parsial (Test T)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.443	.278		-1.590	.121
X1	.020	.009	.383	2.128	.041
X2	.217	.074	.547	2.941	.006
X3	-.064	.102	-.109	-.627	.535
X4	.234	.137	.290	1.701	.098

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data yang telah diolah